

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013



Indikator
Kesejahteraan rakyat



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013



Indikator
Kesejahteraan rakyat



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

<http://ntb.bps.go.id>

© Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2013

ISBN : 978-602-1059-06-7

No. Publikasi : 52540.1404

Katalog BPS : 4102004.52

Naskah : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Desain : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diproduksi : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dicetak Oleh :

Mataram: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 2014
xi + 86 halaman;

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya
May Cited With Mentioning The Source

Kata Pengantar

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013” merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Publikasi ini memberikan informasi tentang perkembangan kesejahteraan penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat yang direpresentasikan oleh sejumlah aspek pembangunan, yang meliputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pola Konsumsi, serta Perumahan. Keenam aspek pembangunan ini diyakini mampu memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Publikasi ini berisi tentang analisa deskriptif yang menarasikan angka-angka statistik berbagai indikator dari aspek pembangunan yang merepresentasikan kesejahteraan penduduk. Selain tabel-tabel yang berisi indikator statistik, pada publikasi ini juga ditampilkan grafik batang (*bar chart*), grafik lingkaran (*pie chart*), grafik garis (*line chart*), serta gambar peta untuk keseluruhan penyajian. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang utuh dan lengkap kepada pengguna untuk digunakan berbagai kepentingan.

Disadari publikasi ini masih memiliki banyak kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Mataram, Oktober 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Wahyudin, MM

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
Bab II. METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data	3
2.2. Konsep dan Definisi	3
Bab III. KEPENDUDUKAN dan KELUARGA BERENCANA	9
3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	10
3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	13
3.3. Struktur Umur.....	15
3.4. Rasio Jenis Kelamin.....	16
3.5. Angka Beban Tanggungan	17
3.6. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama.....	18
Bab IV. KESEHATAN dan GIZI	21
4.1. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	21
4.2. Rata-rata Lama Sakit.....	23
4.3. Cara Pengobatan	24
4.4. Penolong Kelahiran Pertama	26
Bab V. PENDIDIKAN.....	27
5.1. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	28
5.2. Partisipasi Sekolah	29
5.3. Angka Partisipasi Murni	31
5.4. Melek Huruf.....	32
Bab VI. KETENAGAKERJAAN	35
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	35
6.2. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan.....	38
6.3. Jam Kerja.....	39
Bab VII. KEMISKINAN dan POLA KONSUMSI	41
7.1. Penduduk Miskin	42
7.2. Pola Konsumsi.....	45
Bab VIII. PERUMAHAN	49
8.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal	49
8.2. Kualitas Tempat Tinggal.....	51
8.3. Fasilitas Tempat Tinggal.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional sejak era reformasi sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMN dan diterjemahkan dalam RPJMD untuk pembangunan daerah merupakan cara untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan nasional maupun daerah mencakup upaya keseluruhan aspek kehidupan yang meliputi pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan dapat pula berupa pembangunan ideologi (Adi, 2007). Keseluruhan upaya yang dilakukan melalui pembangunan di berbagai aspek tersebut diharapkan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan semua penduduk secara berkelanjutan.

Pembangunan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk telah dilaksanakan dari waktu ke waktu, dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya. Namun, fakta statistik menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang diupayakan baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk dan sisanya masih dalam kondisi kekurangan atau miskin (BPS, 2013). Kekurangan yang dimaksud bagi penduduk, baru sebatas

pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, padahal konsep kesejahteraan sangat luas mencakup banyak aspek yang harus diperhitungkan. Menurut Nasikun (1993) kesejahteraan penduduk menyangkut konsep martabat manusia mencakup empat indikator meliputi: (a) rasa aman, (b) kesejahteraan, (c) kebebasan, dan (d) jati diri. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS, 2000) untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah antara lain meliputi (a) tingkat pendapatan keluarga, (b) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, (c) tingkat pendidikan keluarga, (d) tingkat kesehatan keluarga dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Konsep ukuran kesejahteraan yang dikemukakan para ahli relatif beragam, tetapi substansinya sama, yakni bagaimana ukuran tersebut dapat mengungkap gambaran riil tentang kondisi kesejahteraan penduduk. Spicker (1998) mengemukakan paling tidak terdapat lima aspek utama yang harus diperhatikan, yakni aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerja sosial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Sedangkan Zastrow dalam Adi (2007) menyatakan kesejahteraan penduduk meliputi sembilan aspek, yaitu fisik, perumahan, pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, jaminan sosial, rekreasional, dan aspek pekerjaan sosial.

Pada publikasi ini tidak dapat menyajikan semua aspek kesejahteraan secara ideal seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Spicker, Zastrow, Nasikun karena keterbatasan data yang tersedia. Namun demikian, aspek-aspek kesejahteraan yang disajikan hampir sama dengan konsep Zastrow, hanya tanpa aspek fisik, jaminan sosial, rekreasional dan aspek pekerja sosial, kemudian ditambahkan aspek lain seperti informasi kependudukan dan KB, kemiskinan dan pola konsumsi. Diyakini aspek-aspek yang disajikan telah merepresentasikan ukuran kesejahteraan penduduk. Diharapkan aspek-aspek tersebut mampu memberikan gambaran utuh dan lengkap tentang pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk khususnya kesejahteraan penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2. Tujuan

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2013” disusun untuk tujuan memberikan informasi tentang perkembangan kesejahteraan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013. Potret kesejahteraan penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator yang ditampilkan pada publikasi ini dapat membantu para *stakeholder* dan pengguna data lainnya untuk penyusunan perencanaan dan keperluan evaluasi program-program pembangunan yang telah dilakukan selama periode yang lalu agar tujuan pembangunan dimasa datang lebih tepat sasaran.

1.3. Ruang Lingkup

Disadari, bahwa dimensi kesejahteraan rakyat memiliki spektrum yang sangat luas dan kompleks sehingga tingkat kesejahteraan penduduk tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan multi aspek. Oleh karena itu pada publikasi ini tingkat kesejahteraan penduduk diamati dari berbagai aspek yang

spesifik mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek ditampilkan secara terpisah, menurut subyek atau bidangnya. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan penduduk dapat diamati atau diukur, oleh karena itu pada publikasi ini aspek-aspek kesejahteraan rakyat yang ditampilkan hanya yang dapat diamati dan diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2013” terdiri dari delapan (8) bab. Bab I mengulas tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup serta Sistematika penulisan. Bab II membahas mengenai metodologi mencakup sumber data, konsep dan definisi serta teknik penghitungan untuk mendapatkan angka indikator. Bab III–Bab VIII membahas aspek-aspek kesejahteraan penduduk meliputi Kependudukan dan KB, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pola Konsumsi, serta perumahan.

METODOLOGI

2

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Sensus Penduduk (SP). Meskipun data Susenas dan Sakernas telah menyediakan hampir semua aspek

kesejahteraan rakyat, namun sumber data lain khususnya publikasi “NTB Dalam Angka” juga digunakan sebagai data penunjang sekaligus melengkapi aspek-aspek kesejahteraan penduduk yang ditampilkan.

2.2. Konsep dan Definisi

2.2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- Laju Pertumbuhan Penduduk adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

P_t adalah jumlah penduduk pada tahun t
 P_0 adalah penduduk pada tahun 0
 r adalah laju pertumbuhan penduduk

- Tingkat Kepadatan adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Rumus yang digunakan

$$\text{Tingkat Kepadatan} = \frac{\text{jumlah penduduk suatu wilayah}}{\text{luas wilayah}}$$

- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Rumus yang digunakan

Rasio Jenis Kelamin

$$= \frac{\text{jumlah penduduk laki-laki}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100$$

- Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun)/penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Angka Beban Tanggungan

$$= \frac{\text{penduduk usia 0-14 dan 65+}}{\text{penduduk usia 15-64 tahun}} \times 100$$

- f. Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang

2.2.2. Kesehatan

- a. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah perbandingan antara jumlah bayi (0-1 tahun) yang meninggal dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Atau rata-rata banyaknya bayi yang meninggal setiap seribu kelahiran hidup. Rumus yang digunakan:

Angka Kematian Bayi

$$= \frac{\text{jumlah kematian 0 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 1000$$

- b. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- c. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu saat. Presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diantaranya panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi atau keluhan lainnya juga termasuk orang yang memiliki penyakit akut atau penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan).

PKK = (JPKK/JP) X 100%

PKK adalah Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

JPKK adalah Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan

JP adalah Jumlah Penduduk

- d. Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) Merupakan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (sakit).

AM = (JPS/JP) X 100%

AM adalah Angka Morbiditas/kesakitan
JPS adalah Jumlah Penduduk Sakit
JP adalah Jumlah Penduduk

dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya.

- e. Rata-rata Lama Sakit adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan. Menunjukkan rata-rata lama hari sakit yang dialami penduduk. Rata-rata lama sakit dimaksud selama satu bulan terakhir (maksimal per individu 30 hari).

RRLS = THLS / JPS

RRLS : Rata-rata Lama Sakit

THLS : Total Hari Lama Sakit

JPS : Jumlah Penduduk yang Sakit

- f. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia
- g. Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis adalah rasio banyaknya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- h. Mengobati sendiri adalah upaya arti yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenagakesehatan/batra). Menunjukkan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri

PPSO = (PSO/JPS)X100%

PPSO adalah Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri.

PSO adalah Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang mengobati sendiri.

JPS adalah Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit .

- i. Berobat jalan adalah kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art. Menunjukkan banyaknya penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan.

2.2.3. Pendidikan

- a. Bersekolah adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.
- b. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf

$$= \frac{\text{penduduk 15 tahun keatas yang melek huruf}}{\text{jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100$$

- c. Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. MYS dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Sekolah

$$= \frac{\text{jumlah penduduk yang bersekolah}_i}{\text{jumlah penduduk}_i}$$

i = kelompok usia = 7 - 12, 13 - 15, 16 - 18

PPSJ = (PSJ/JPS)X100%

PPSJ adalah Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan. PSJ adalah Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit yang berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan. JPS adalah Jumlah penduduk dengan keluhan kesehatan atau sakit

- e. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni

$$= \frac{\text{jumlah penduduk yang bersekolah usia bersesuaian}_i}{\text{jumlah penduduk}_i}$$

i = jenjang = SD (7-12), SMP (13-15), SMA (16-18)

- f. Rasio Murid dan Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan/sekolah dengan jumlah sekolah pada pendidikan tersebut. Rumus yang digunakan adalah

Rasio Murid dan Sekolah

$$= \frac{\text{jumlah murid}_i}{\text{jumlah sekolah}_i}$$

i = jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA)

- g. Rasio Murid dan Guru adalah perbandingan antara jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah

Rasio Murid dan Guru

$$= \frac{\text{jumlah murid}_i}{\text{jumlah guru}_i}$$

i = jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA)

2.2.4. Ketenagakerjaan

- a. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- b. Menganggur adalah keadaan seseorang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan.
- c. Angkatan Kerja (AK) adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.
- d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Rumus yang digunakan yaitu:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$$= \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja (15+)}} \times 100$$

- e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan

Tingkat Kesempatan Kerja

$$= \frac{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

Tingkat Pengangguran Terbuka

$$= \frac{\text{jumlah penduduk yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

- g. Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.
- h. Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
- i. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Buruh/karyawan/pegawai, Pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

2.2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- a. Konsumsi/pengeluaran (makanan maupun non makanan) adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga baik berasal dari pembelian, produksi sendiri atau pemberian. Untuk konsumsi yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya diperhitungkan sesuai dengan harga pasar setempat.
- b. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran rumahtangga sebulan di bawah garis kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yaitu 2100kcal/kapita/hari ditambah kebutuhan dasar non makanan khususnya

2.2.6. Perumahan dan Sanitasi

- a. Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. Atap layak adalah atap selain daun-daunan yaitu Beton, Genteng, Sirap, Seng dan Asbes
- c. Dinding Pemanen adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako (dinding tembok) dan dinding kayu
- d. Air bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m.
- e. Jamban Sehat adalah jamban/kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden sendiri dengan kloset leher angsa serta dilengkapi tangki pembuangan (tangki septik).

<http://ntb.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN dan KELUARGA BERENCANA

3

Salah satu isu kependudukan yang saat ini sedang diperbincangkan adalah bagaimana menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi “the window of opportunity” dari bonus demografi. Indonesia diperkirakan akan mencapai bonus demografi di tahun 2020 - 2030, dimana penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) sangat besar sementara usia non produktif (penduduk usia 0 - 4 tahun dan 65+) semakin mengecil. Kesempatan berharga berupa bonus demografi itu terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan rakyat Indonesia menurunkan tingkat fertilitas, mortalitas dan pertumbuhan penduduk berkat keberhasilan program KB, kesehatan dan pembangunan lainnya. Bonus demografi ini akan memiliki pengaruh terhadap keadaan sosial maupun ekonomi. Bonus demografi dapat diukur seberapa besar rasio antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun plus 65 +) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) atau disebut angka ketergantungan (dependency ratio).

Jendela kesempatan atau “the window of opportunity” ditandai dengan melimpahnya jumlah penduduk usia kerja. Pada satu sisi dapat memberikan keuntungan ekonomi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun pada sisi lain jika bonus demografi tidak dipersiapkan kedatangannya maka masalah yang timbul adalah besarnya jumlah pencari kerja.

Uraian di atas merupakan permasalahan kependudukan di masa datang, disamping permasalahan penduduk lainnya. Untuk saat ini, fenomena kependudukan paling mendesak yang segera ditangani adalah meningkatnya jumlah penduduk dengan distribusi yang tidak merata serta komposisi struktur umur yang tidak seimbang. Fenomena kependudukan seperti ini diperkirakan dapat mempersulit upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan penduduk.

Meningkatnya jumlah penduduk yang relatif besar disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk ini salah satunya disebabkan oleh tingginya faktor kelahiran. Konsekuensinya, jumlah penduduk pada golongan umur muda atau penduduk dengan struktur umur muda menjadi besar dan dalam piramida penduduk digambarkan bahwa komposisi usia muda melebar. Dengan struktur penduduk seperti itu, tingkat ketergantungan penduduk masih relatif tinggi karena jumlah penduduk yang hidupnya tergantung pada golongan penduduk lainnya masih relatif lebih tinggi. Jumlah penduduk usia muda yang besar mengakibatkan kebutuhan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan kesejahteraan yang semakin meningkat.

3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal pembangunan. Tetapi menjadi beban dalam pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu kesejahteraan, permasalahan penduduk harus mendapatkan perhatian lebih serius dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk, disamping upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.1 memperlihatkan perkembangan

jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 1971–2013. Secara absolut, penduduk Nusa Tenggara Barat setiap tahun terus bertambah. Hasil Sensus Penduduk 1971 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat semula hanya sebanyak 2.203 ribu jiwa, bertambah pada tahun 1980 menjadi 2.724 ribu jiwa dan tahun 1990 bertambah lagi menjadi 3.369 ribu jiwa serta tahun 2000 bertambah juga menjadi

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (000)					
	1971	1980	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lombok Barat	510	655	584	700	600	620
Lombok Tengah	476	577	679	784	860	882
Lombok Timur	596	725	865	1 023	1 106	1 130
Sumbawa	244	304	373	379	416	426
Dompu	74	96	145	190	219	226
Bima	303	367	448	396	439	451
Sumbawa Barat	-	-	-	88	115	121
Lombok Utara	-	-	-	-	200	420
Kota Mataram	-	-	275	332	403	149
Kota Bima	-	-	-	117	143	205
N T B	2 203	2 724	3 369	4 009	4 500	4 630

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 1971-2010

Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Jumlah Penduduk 2013

4.009 ribu jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat sudah mencapai sebanyak 4.500 ribu jiwa dan hasil estimasi tahun 2013 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat menjadi sebanyak 4.630 ribu jiwa. Melihat perkembangan peningkatan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Nusa Tenggara Barat harus terus mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan guna mengendalikan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Tabel 3.1. juga memberikan informasi jumlah dan perkembangan penduduk masing-masing kabupaten/kota dari tahun 1971-2013. Terlihat

pada tabel tersebut semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dengan kuantitas pertumbuhan yang berbeda. Tiga Kabupaten paling banyak pertumbuhan penduduknya adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Keadaan tahun 2013, Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu sekitar 1.130 ribu jiwa, disusul Kabupaten Lombok Tengah sekitar 882 ribu jiwa dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 620 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu sekitar 121 ribu jiwa. Dari pertumbuhan jumlah penduduk dapat

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	2,80	2,75	1,83	1,50*
Lombok Tengah	2,11	1,64	1,45	0,94
Lombok Timur	2,19	1,78	1,69	0,78
Sumbawa	2,48	2,06	2,26*	0,94
Dompu	2,36	4,22	2,76	1,44
Bima	2,10	2,02	1,44*	1,05
Sumbawa Barat	-	-	-	2,73
Lombok Utara	-	-	-	-
Kota Mataram	-	-	1,89	1,97
Kota Bima	-	-	-	2,03
NTB	2,36	2,15	1,75	1,17

Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Jumlah Penduduk 2013

dihitung laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu. Dari LPP ini dapat dilihat besarnya pertumbuhan penduduk di setiap kabupaten/kota. Tabel 3.2. menyajikan LPP di setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Pada tabel tersebut, menunjukkan perkembangan LPP NTB yang mengalami penurunan. Selama periode 1971-1980 LPP Provinsi Nusa Tenggara

Tabel 3.2.

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 1971-2010

Barat mencapai 2,36 persen per tahun, kemudian turun menjadi 2,15 per tahun pada periode 1980-1990. Sementara itu, pada periode 1990-2000 LPP turun menjadi 1,75 persen per tahun dan turun lagi pada periode 2000-2010 menjadi 1,17 persen per tahun. Penurunan LPP ini memberikan indikasi factor kelahiran yang menjadi penyebab pertumbuhan jumlah penduduk mengalami penurunan. Hal

ini menunjukkan program pemerintah dalam pengendalian penduduk melalui KB untuk pengaturan kelahiran telah berhasil, disamping kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur jumlah kelahiran.

Besaran LPP antar kabupaten/kota relatif beragam. Hal ini sangat tergantung dari dinamika factor demografi (kelahiran, kematian, migrasi) setiap kabupaten/kota. Pada periode 2000-2010, LPP setiap kabupaten/kota relatif variasi dengan rentang 0,94 - 2,73. Selama kurun waktu 1971-2000 Kabupaten Dompu memiliki LPP paling tinggi dibanding kabupaten/kota yang lain. Sedangkan dalam kurun waktu 2000-2010 Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan LPP tertinggi di

antara semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten dengan rata-rata LPP terendah adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sekitar 0,78 persen per tahun dan yang tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai 2,73 persen per tahun. Tingginya LPP Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan, disamping karena pertumbuhan penduduk alami, juga karena migrasi penduduk sebagai akibat (a) tersedianya lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, yakni PT NNT (Newmont Nusa Tenggara), (b) terbentuknya pemerintahan baru yang mendorong penduduk luar daerah mencari pekerjaan di sana.

Selama periode 1971-2010 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Terdapat

Indikator	Perkembangan TFR dan CBR				
	1971	1980	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TFR	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59
CBR	-	-	25,4	17,3	21,3

Tabel 3.3.

Perkembangan TFR dan CBR di Nusa Tenggara Barat, 1971-2010

Sumber : SP 1971-2010

beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab penurunan LPP di provinsi Nusa Tenggara Barat. Faktor tersebut antara lain adalah migrasi penduduk keluar dari provinsi, misalnya migrasi penduduk keluar untuk bekerja ke luar negeri atau migrasi penduduk keluar untuk melanjutkan pendidikan/sekolah ke provinsi lain. Penyebab lain, adalah dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan keluarga berencana, memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran dan kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk menjadi turun. Hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2010 menunjukkan penurunan Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) seperti yang terlihat pada Tabel 3.3. Pada tabel tersebut menunjukkan TFR selama periode

1971-2010 mengalami penurunan, yaitu dari 6,66 pada tahun 1971 menjadi 2,59 pada tahun 2010. Ini berarti bahwa secara rata-rata wanita usia (15-49 tahun) di Nusa Tenggara Barat akan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara indikator lain, CBR (*crude birth rate*) juga memberikan informasi secara kasar tingkat kelahiran oleh wanita di NTB. Selama kurun waktu 1990-2010 CBR mengalami penurunan dari 25,4 menjadi 21,3 per 1000 wanita.

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah mempersulit pemanfaatan sumber alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung memberikan tekanan/beban terhadap ekosistem karena penduduk sangat membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini lambat laun akan merusak lingkungan hidup dan pada gilirannya akan merugikan penduduk secara keseluruhan. Ketidakmerataan penduduk antar wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan geografis dengan kondisi alam yang subur dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah daya tarik

wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa serta pusat pendidikan. Tabel 3.4. memperlihatkan persebaran penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tabel tersebut terlihat ketimpangan penyebaran penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gambaran ketimpangan penyebaran penduduk ditandai dengan terdapat sekitar 70 persen penduduk Nusa Tenggara barat bermukim di Pulau Lombok dan sisanya sekitar 30 persen bermukim di pulau Sumbawa. Padahal dari segi luas wilayah (daratan) ada sekitar 2/3 luas daratan Provinsi Nusa Tenggara barat berada di Pulau Sumbawa. Sementara itu, sebaran penduduk di masing-masing

Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah	Persentase Penduduk					
		1971	1981	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	5,23	23,14	24,05	17,33	17,46	13,33	13,40
Lombok Tengah	6,00	21,65	21,18	20,14	19,55	19,11	19,04
Lombok Timur	7,97	27,03	26,62	25,69	25,52	24,57	24,41
Sumbawa	32,97	11,05	11,17	11,07	9,46	9,24	9,20
Dompu	11,53	3,36	3,52	4,29	4,74	4,87	4,89
Bima	21,78	13,77	13,46	13,30	9,88	9,76	9,74
Sumbawa Barat	9,17	*)	*)	*)	2,20	2,55	2,62
Lombok Utara	4,02	*)	*)	*)	*)	4,45	4,43
Kota Mataram	0,30	*)	*)	8,16	8,28	8,95	9,06
Kota Bima	1,03	*)	*)	*)	2,92	3,17	3,21
N T B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.4.

Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, Tahun 1971 - 2013

Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Penduduk 2013

*) masih bergabung dengan kabupaten induk

kabupaten/kota pada tahun 2013 komposisinya sekitar 24,41 persen bermukim di Kabupaten Lombok Timur, sekitar 19,04 persen bermukim di Kabupaten Lombok Tengah, dan 13,40 persen bermukim di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya (kota Mataram, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Kota Bima dan KLU penduduk yang bermukim tidak lebih dari 10 persen dari jumlah seluruh penduduk NTB. Bahkan Kabupaten Sumbawa Barat penduduknya hanya 2 persen

dari jumlah penduduk NTB. Jika dibandingkan luas wilayah dan sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang tersedia, maka di NTB terjadi ketidakseimbangan penduduk antar kabupaten/kota dan pulau.

Tabel 3.5, menyajikan data luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa pada 2013, Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah sebesar 6,643,98 km² yaitu sepertiga dari luas

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)					
		1971	1980	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lombok Barat	1 053,92	229	384	362	376*	569	589
Lombok Tengah	1 208,40	334	404	475	649	712	730
Lombok Timur	1 605,55	371	452	539	637	689	704
Sumbawa	6 643,98	29	36	44	57	63	64
Dompu	2 324,60	32	41	62	82	94	97
Bima	4 389,40	66	80	97	90	100	103
Sumbawa Barat	1 849,02	*)	*)	*)	48	62	66
Lombok Utara	809,53	*)	*)	*)	*)	247	253
Kota Mataram	61,30	*)	*)	4 295	5 414	7 149	6 846
Kota Bima	207,50	*)	*)	*)	563	687	716
NTB	20 153,20	109	135	167	376	223	230

Tabel 3.5.

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1971 - 2013

Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Penduduk 2013

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tingkat kepadatan penduduk paling kecil yaitu 64 jiwa/km². Kenyataan dan kondisi yang sangat kontradiktif ditunjukkan oleh Kota Mataram dimana dengan luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 61,3 km² atau hanya 0,3 persen dari luas wilayah Provinsi NTB merupakan yang terpadat, dengan tingkat kepadatan sebesar 6.740,78 jiwa/km². Padatnya penduduk Kota Mataram disebabkan Kota Mataram adalah

pusat pemerintahan provinsi NTB dan daya tarik seperti tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

3.3. Struktur Umur

Data penduduk menurut struktur umur sangat diperlukan dalam berbagai analisa kependudukan. Data dan informasi tentang struktur umur penduduk memiliki peranan penting sebagai dasar pengambilan kebijakan/keputusan terkait dengan berbagai program pembangunan. Data penduduk yang dirinci menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui komposisi struktur penduduk suatu wilayah apakah memiliki struktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk umur muda apabila sekitar 40 persen atau lebih penduduk berusia dibawah 15 tahun dari seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari seluruh penduduk.

Berdasarkan fakta statistic penduduk Provinsi NTB tergolong struktur umur muda. Fenomena ini, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang meliputi gedung, tenaga pengajar,

tenaga kesehatan termasuk factor kemudahan penduduk untuk mengakses.

Tabel 3.6 menyajikan informasi tentang persebaran penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kelompok umur. Pada tabel tersebut memperlihatkan hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan hasil estimasi penduduk tahun 2013 menunjukkan persentase kelompok umur muda (0 - 14 tahun) telah mencapai lebih dari 40 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa NTB termasuk provinsi yang masih memiliki penduduk dengan struktur umur muda. Namun demikian, apabila dilihat dari trennya jumlah penduduk umur muda mengalami penurunan, sebaliknya dikelompok umur tua mengalami kenaikan.

Persebaran penduduk berikut komposisi dalam kelompok umur dapat juga dilihat dari gambar piramida penduduk. Melalui piramida penduduk, besaran penduduk menurut struktur umur berikut implikasi dapat teridentifikasi sehingga kebutuhan penduduk (balita, remaja,

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	18,6	16,6	14,3	11,3	10,6	10,57
5 - 9	17,4	16,7	14,3	11,8	10,4	10,22
10 - 14	9,3	11,2	13,1	12,1	10,2	10,09
15 - 19	8,7	9,0	10,2	10,5	9,5	9,49
20 - 24	7,2	7,6	7,7	8,9	8,6	8,55
25 - 29	8,5	7,5	7,7	8,8	9,0	8,82
30 - 34	6,9	6,1	6,8	7,5	7,9	7,98
35 - 39	6,4	6,1	6,1	6,9	7,5	7,49
40 - 44	5,0	4,8	4,6	5,7	6,2	6,35
45 - 49	3,3	3,8	4,2	4,5	5,2	5,28
50 - 54	3,2	3,4	3,2	3,7	4,5	4,60
55 - 59	1,4	2,0	2,4	2,5	3,1	3,22
60 - 64	2,0	2,2	2,0	2,4	2,7	2,66
65+	2,2	3,1	3,3	3,4	4,6	4,66
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.6.

Persebaran Penduduk Menurut Kelompok Umur, 1971 - 2013

Sumber : SP 1971-2010, Estimasi Penduduk 2013

dewasa, tua) yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan serta kebutuhan dasar lainnya dapat ditentukan. Dari gambar piramida

penduduk kebutuhan penduduk Provinsi NTB dapat dipenuhi melalui kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.



Gambar 3.2.
Piramida Penduduk Tahun 2013

Sumber : Estimasi Penduduk 2013

3.4. Rasio Jenis Kelamin

Informasi tentang rasio jenis kelamin atau perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan program kependudukan. Disamping itu, informasi rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk memetakan berbagai kebutuhan penduduk berbasis jenis kelamin.

daerah pengirim migran, khususnya tenaga kerja laki-laki ke luar daerah/negeri, seperti yang ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin pada kelompok umur muda/produktif (20 – 54 tahun).

Hasil Sensus Penduduk 1971, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 99,1 yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Selama rentang waktu dari tahun 1971 hingga 2013, rasio jenis kelamin mengalami penurunan secara perlahan sehingga menjadi 95,59 pada tahun 2013. Besaran rasio jenis kelamin yang kurang dari 100, memberikan indikasi bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	95,0	100,8	103,9	103,4	105,7	106,39
5 - 9	103,5	100,0	102,9	106,4	105,3	105,10
10 - 14	112,3	111,0	101,9	106,2	104,9	104,86
15 - 19	98,7	102,8	96,3	95,2	99,1	103,65
20 - 24	71,0	79,0	74,0	73,8	83,1	85,83
25 - 29	85,4	88,7	82,5	82,3	83,2	83,61
30 - 34	92,1	89,3	86,3	85,8	85,6	86,63
35 - 39	109,1	103,9	97,8	88,7	89,2	91,57
40 - 44	104,3	100,5	91,2	94,4	90,2	94,10
45 - 49	124,4	104,5	98,6	101,8	92,5	97,99
50 - 54	100,8	99,5	103,9	101,6	93,7	95,66
55 - 59	84,7	87,1	105,6	104,5	100,9	98,02
60 - 64	89,9	107,3	99,6	100,5	94,4	94,76
65 - 69	102,1	91,5	89,0	95,1	93,0	90,65
70 - 74	105,2	100,3	94,6	96,9	88,6	85,82
75+	107,5	94,1	94,3	92,1	77,3	78,90
Jumlah	99,1	98,3	95,5	94,9	94,3	95,59

Tabel 3.7.

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 1971 - 2013

Sumber : SP 1971 - SP2000, Estimasi Penduduk 2013

3.5. Angka Beban Tanggungan

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* sangat penting dalam studi bidang ekonomi. Nilai rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui seberapa besar beban tanggungan kelompok usia produktif yaitu umur 15 - 64 tahun terhadap kelompok tidak produktif, yaitu kelompok umur 0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas. Perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0-14 tahun.

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 1971 sampai dengan 2013 beban tanggungan ekonomi usia produktif terhadap usia tidak produktif dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan rasio ketergantungan

selama periode 1971 hingga 2013. Hasil Sensus Penduduk 1971, rasio ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 89,26 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 89 penduduk usia tidak produktif dimana 85 diantaranya tergolong penduduk usia muda dan sisanya penduduk usia tua. Pada tahun 2010 beban ketergantungan mencapai 55,55 penduduk, kemudian menurun menjadi 55,14 penduduk tahun 2013. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia tidak produktif, dimana 47 diantaranya tergolong pada penduduk usia muda dan sisanya penduduk usia tua. Hingga tahun 2013, penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0-14 tahun).

Besarnya jumlah penduduk usia produktif memang sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban tanggungan dari sesi ekonomi bagi penduduk yang tidak produktif. Tetapi ini belum cukup karena penduduk yang ditanggung bukan hanya dipenuhi kebutuhannya sekedarnya melainkan harus hidup layak. Oleh karena itu

penduduk usia produktif perlu diupayakan menjadi penduduk usia produktif berkualitas seperti ketrampilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatannya agar dapat menopang penduduk usia tidak produktif sesuai dengan standar kebutuhan yang layak.

Rasio Ketergantungan	1971	1980	1990	2000	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia Muda	85,22	84,65	76,12	57,43	48,45	47,91
Penduduk Usia Tua	4,04	5,87	6,14	5,65	7,09	7,24
Jumlah	89,26	90,51	82,26	63,09	55,55	55,14

Tabel 3.8.

Rasio Ketergantungan Penduduk Muda dan Tua, 1971 - 2013

Sumber : SP 1971 - SP2000, Estimasi Penduduk 2013

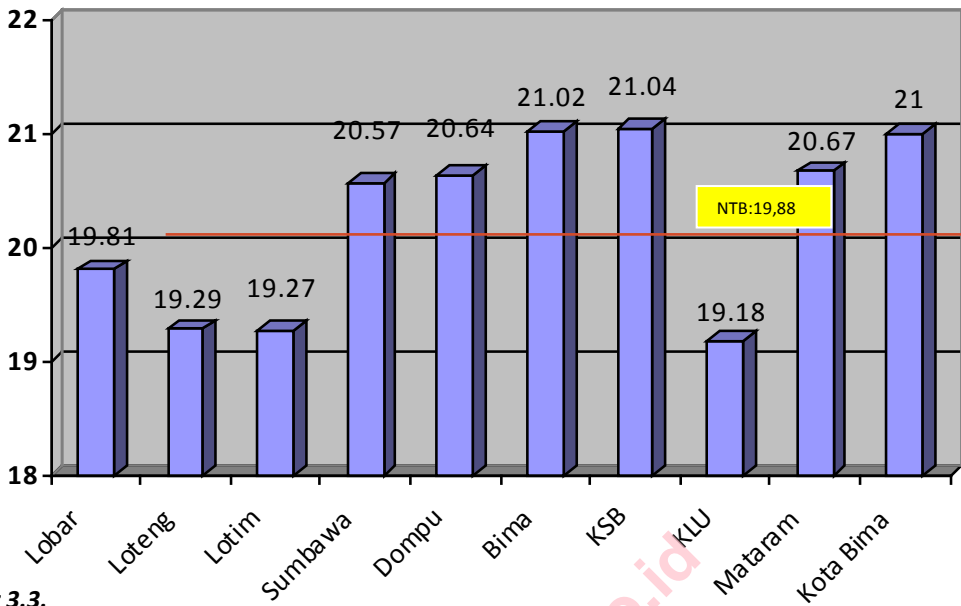
3.6. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Sesuai dengan keinginan pemrov NTB tentang “pendewasaan usia perkawinan”, maka melalui gerakan PKK dan instansi terkait secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. idealnya seorang wanita akan menikah membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Bagi wanita menikah di usia dini, maka dipastikan secara fisik seperti organ reproduksi belum matang, mental juga belum cukup. Menikah di usia dini menimbulkan banyak akibat antara lain angka perceraian tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian juga tinggi, bayi yang dilahirkan kurang sehat.

Rata-rata umur perkawinan pertama merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat fertilitas. Semakin muda usia seseorang melakukan perkawinan, maka semakin panjang pula masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Rata-rata usia perkawinan juga menggambarkan masih ada tidaknya budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini atau kecenderungan masyarakat untuk melakukan pernikahan dibawah usia.

Perkembangan data mengenai umur perkawinan menunjukkan bahwa rata-rata usia perkawinan memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor seperti perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pola pikir penduduk yang tertanam akibat dari nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang semula mendukung ingginya fertilitas melalui perkawinan usia muda sudah semakin berkurang. Selain itu perempuan semakin mendapatkan kesempatan sekolah dan bekerja, maka dipastikan ada kecenderungan menunda perkawinan atau membatasi kelahiran.

Gambar 3.3 memperlihatkan perkembangan rata-rata usia perkawinan pertama untuk perempuan yang pernah kawin tahun 2013. Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan di Provinsi NTB berkisar antara 19 - 21 tahun. Secara rata-rata, usia perkawinan pertama di Provinsi NTB sudah sesuai undang-undang perkawinan, yaitu di atas 16 tahun. Kabupaten Lombok Utara mempunyai rata-rata usia perkawinan pertama paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB, Rata-rata usia perkawinan pertama di Kabupaten Lombok Timur sekitar



Gambar 3.3.

Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

19,18 tahun, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai rata-rata usia perkawinan pertama paling tinggi, yaitu sekitar 21,04 tahun. Fenomena yang menarik adalah perbedaan rata-rata usia perkawinan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Rata-rata usia kawin pertama di pulau Lombok lebih muda yaitu sekitar 19 tahun dibandingkan rata-rata usia kawin di

pulau Sumbawa yaitu 21 tahun. Fenomena ini dapat disebabkan adanya budaya “kawin lari” di pulau Lombok dimana di pulau Lombok anak perempuan harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang membawanya pergi ke rumah keluarga laki-laki.

KESEHATAN DAN GIZI 4

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah mulai menerapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelumnya, dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah telah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas dan didukung pula melalui dana APBD dengan adanya jamkesda (jaminan kesehatan Daerah). Jamkesmas dan jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas dan jemkesda adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kesakitan, dan indikator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti persentase balita ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk,

4.1. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, dapat terlihat dari angka morbiditas (angka kesakitan) yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumahtangga maupun melakukan aktivitas lainnya untuk mendapatkan

indicator kesehatan, dapat diperoleh dari data Susenas yang mengumpulkan keterangan tentang simtom, yaitu suatu kondisi umum yang dirasakan penduduk sebagai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami penduduk meliputi panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare,

sakit kepala berulang, sakit gigi, dll, Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan selanjutnya

apabila mengganggu aktivitas sehari-hari maka menjadi indikator angka kesakitan.

Tabel 4.1 menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam

Kabupaten/Kota	Keluhan		Angka Kesakitan	
	2011	2013	2011	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	23,39	20,91	12,41	12,95
Lombok Tengah	39,69	41,79	23,20	21,94
Lombok Timur	39,18	43,90	21,99	24,28
Sumbawa	35,92	29,86	19,52	13,89
Dompu	27,70	16,87	16,90	11,31
Bima	26,27	28,99	19,37	19,89
Sumbawa Barat	46,06	57,25	20,83	16,70
Lombok Utara	30,55	30,36	16,85	19,61
Kota Mataram	35,49	27,51	18,67	14,71
Kota Bima	46,62	38,26	19,66	19,79
N T B	34,75	34,42	19,58	18,86

Tabel 4.1.

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu dan Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 - 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

kurun waktu 2011-2013. Pada tabel tersebut menunjukkan, selama kurun waktu 2011-2013 bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengalami penurunan. Pada tahun 2011 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Nusa Tenggara Barat tercatat sekitar 34,75 persen kemudian menurun menjadi sebanyak 34,42 persen pada tahun 2013. Pola penurunan yang di tingkat provinsi juga dialami oleh beberapa kabupaten/kota seperti Lombok Barat, Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Namun sebaliknya di beberapa kabupaten/kota lainnya terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Gambaran tersebut di atas memberikan salah satu indikasi bahwa masih cukup banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan

meski demikian dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan menurun.

4.2. Rata-rata Lama Sakit

Lama sakit merupakan salah satu indikator kesehatan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk. Semakin lama (hari) sakit maka jenis keluhan kesehatan (penyakit) yang dialami dapat diasumsikan cukup serius. Menurunnya angka kesakitan pada tahun 2013 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit (hari). Tabel 4.2 menunjukkan gambaran kondisi rata-rata lama sakit (hari) penduduk di Nusa Tenggara Barat.

Rata-rata lama sakit penduduk di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2010 – 2013 mengalami penurunan, yaitu sekitar 6,04 hari pada Tahun 2010 dan menurun menjadi 5,42 hari pada Tahun 2013. Apabila dilihat masing-masing kabupaten/kota, terlihat bahwa pada Tahun 2013 Kabupaten Dompu mempunyai rata-rata lama sakit paling pendek dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu hanya 4,32 hari, sedangkan kabupaten yang mempunyai rata-rata lama sakit yang paling lama terjadi di Kabupaten Bima, yaitu sekitar 6,84 hari,

Kabupaten/Kota	2010	2013
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	6,31	4,71
Lombok Tengah	6,40	5,81
Lombok Timur	5,57	5,19
Sumbawa	6,82	5,31
Dompu	6,24	4,32
Bima	6,93	6,84
Sumbawa Barat	5,77	6,73
Lombok Utara	4,46	5,34
Kota Mataram	5,60	4,66
Kota Bima	5,84	4,63
N T B	6,04	5,42

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Tabel 4.2.

Rata-rata Lama Sakit Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013

4.3. Cara Pengobatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan juga bisa dilihat dari fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit sehingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayan, kondisi social ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan

Ada dua cara pengobatan terhadap gangguan kesehatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengobati sendiri dan atau pergi ke fasilitas kesehatan. Apabila seseorang

mengalami gangguan kesehatan, biasanya akan berusaha terlebih dahulu mengobati sendiri penyakit tersebut, setelah beberapa waktu tidak mengalami kesembuhan, barulah akan pergi ke fasilitas kesehatan yang ada. Tindakan seperti itu sebetulnya kurang baik, karena pemberian obat tanpa diagnosa akan berbahaya bagi si penderita dan keterlambatan dalam penanganan penyakit akan berakibat fatal, akhirnya dapat berlanjut pada pengobatan dengan rawat inap, Tabel 4.3 menunjukkan gambaran perilaku penduduk dalam melakukan pengobatan terhadap keluhan kesehatan yang dialami. Pada tahun 2013 sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan tanpa diagnosa (diobati sendiri) yaitu mencapai 63,97 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 penduduk yang mengobati sendiri mengalami peningkatan. Kondisi

Kabupaten/Kota	2010	2013
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	73,02	66,79
Lombok Tengah	52,65	62,09
Lombok Timur	56,77	61,04
Sumbawa	75,46	74,01
Dompu	83,88	78,58
Bima	67,04	75,18
Sumbawa Barat	68,84	44,52
Lombok Utara	80,15	72,79
Kota Mataram	55,75	62,69
Kota Bima	52,53	54,53
N T B	62,87	63,97

Tabel 4.3.
Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Kabupaten/Kota	2010	2013
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	49,41	43,16
Lombok Tengah	57,44	58,00
Lombok Timur	55,91	48,31
Sumbawa	48,72	44,50
Dompu	50,13	51,90
Bima	50,75	50,81
Sumbawa Barat	47,29	39,23
Lombok Utara	45,69	50,96
Kota Mataram	53,87	52,43
Kota Bima	48,69	50,77
N T B	52,84	50,19

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Tabel 4.4.

Persentase Penduduk Yang Pernah Berobat Jalan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010 - 2013

menunjukkan masih banyak penduduk yang melakukan pengobatan sendiri. Tindakan ini diduga dilakukan oleh penduduk karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat sangat murah/dapat terjangkau atau memang menganggap bahwa keluhan yang dialami tidak terlalu serius. Perilaku seperti ini cukup tinggi risikonya bagi masyarakat dan dapat membawa akibat yang lebih fatal.

Sedangkan penduduk yang melakukan pengobatan dengan diagnosa (ditangani tenaga kesehatan) baik secara langsung, maupun setelah melakukan pengobatan

sendiri dapat dilihat pada tabel 4.4. Dari tabel 4.4 memperlihatkan bahwa masih relatif kecil penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk terkait kondisi ekonomi penduduk juga. Jika kita melihat perilaku berobat jalan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2010-2013 telah mengalami penurunan, sebanyak 52,84 persen penduduk berobat jalan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 50,19 persen pada tahun 2013.

4.4. Penolong Kelahiran Pertama

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan peningkatan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya, Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan, Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 77,67 persen di tahun 2013. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran bidan sebagai penolong persalinan. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Dompu memiliki persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis paling rendah, yaitu 55,25 persen sedangkan yang tertinggi adalah di Kota Mataram.

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Pertama			Total
	Tenaga Medis	Dukun Bersalin	Lainnya ¹⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	93,66	6,34	0,00	100,00
Lombok Tengah	83,23	14,29	2,48	100,00
Lombok Timur	84,10	13,58	2,32	100,00
Sumbawa	73,47	19,44	7,09	100,00
Dompu	66,88	30,68	2,44	100,00
Bima	76,00	19,89	4,10	100,00
Sumbawa Barat	61,99	31,66	6,34	100,00
Lombok Utara	80,02	11,92	8,05	100,00
Kota Mataram	99,22	0,36	0,42	100,00
Kota Bima	80,46	19,13	0,41	100,00
N T B	82,74	14,42	2,84	100,00

Tabel 4.4.
Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) catatan : 1) Famili/Keluarga/Lainnya

PENDIDIKAN

5

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan dan sekaligus menjadi titik sentral pembangunan. Melalui pendidikan yang memadai, maka dapat diperoleh sumberdaya manusia yang handal yang akan melaksanakan fungsi-fungsi institusi melalui sikap dan kompetensi dalam menentukan kualitas kinerja institusi. Disini tampak jelas peran sentral pendidikan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan semestinya memperoleh prioritas tinggi, disamping tidak mengabaikan pembangunan di bidang lainnya seperti kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, maka pemerintah daerah NTB melakukan upaya terobosan guna meningkatkan kualitas sumberdaya penduduk. Upaya tersebut adalah melaksanakan gerakan 3 A (Absano, Adono, Akino) yang memiliki tujuan dan sasaran, yaitu membebaskan penduduk NTB dari penyakit buta huruf (absano), membebaskan penduduk usia sekolah agar tidak putus sekolah/dropout (adono), dan mencegah seminimal mungkin kematian ibu dan bayi (akino). Selain gerakan 3 A, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah juga melaksanakan program pembangunan sarana prasarana dan sarana sekolah yang ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah serta beragam jenis beasiswa. Untuk mengetahui kemajuan pembangunan sektor pendidikan, maka diperlukan "indikator" sebuah alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan. Beragam jenis indikator pendidikan yang dapat digunakan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

5.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia dapat dilihat seberapa tinggi jenjang pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan penduduk dapat diketahui dari jenjang pendidikan yang ditamatkan serta diperkuat dengan ijazah tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat

perkembangan kualitas sumber daya manusia suatu daerah dengan melihat jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduknya. Dengan mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk, maka kualitas SDM di daerah bersangkutan dapat diperkirakan.

Kabupaten/Kota	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan							Total
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD	SMP	SMU	Diploma	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lombok Barat	18,37	23,54	26,76	14,96	13,33	0,69	2,35	100,00
Lombok Tengah	17,97	23,58	25,61	15,23	13,68	1,04	2,89	100,00
Lombok Timur	10,22	25,77	28,62	17,55	13,14	1,29	3,40	100,00
Sumbawa	5,02	20,21	32,44	19,74	17,54	1,09	3,97	100,00
Dompu	7,82	20,77	21,52	18,69	23,22	2,61	5,37	100,00
Bima	6,91	26,44	26,18	14,62	21,12	1,83	2,89	100,00
Sumbawa Barat	5,25	22,84	29,29	14,41	22,19	1,32	4,69	100,00
Lombok Utara	21,16	26,06	26,11	13,15	11,32	1,15	1,05	100,00
Kota Mataram	6,65	15,53	20,84	16,59	29,64	2,67	8,02	100,00
Kota Bima	4,06	15,54	18,75	16,61	36,12	1,01	7,92	100,00
NTB	11,71	23,00	26,42	16,33	17,39	1,37	3,77	100,00

Tabel 5.1.

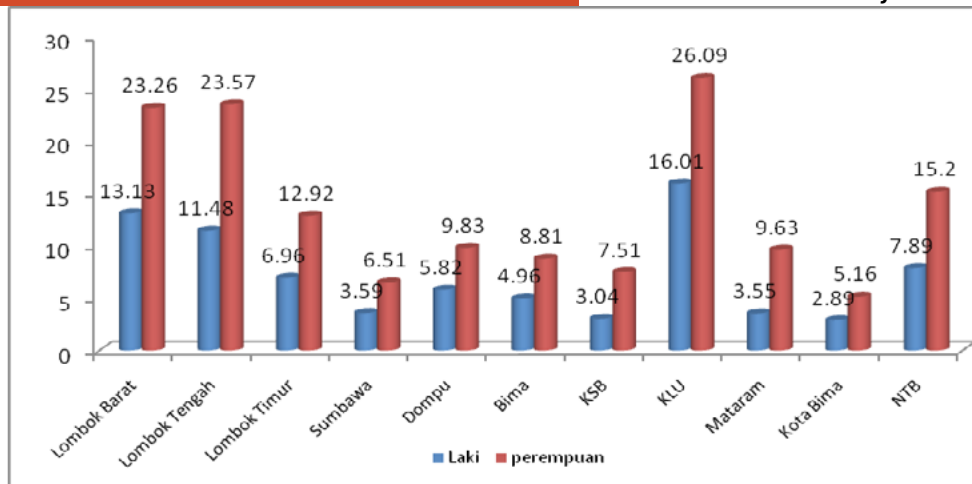
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Tabel 5.1 menyajikan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kabupaten/kota. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 secara umum pendidikan penduduk di Provinsi NTB masih rendah, yakni sekitar 61 persen berpendidikan sekurang-kurangnya SD. Secara rinci masing-masing sekitar 11,71 persen tidak/

belum sekolah dan tidak/belum tamat SD sekitar 23 persen. Sedangkan penduduk yang berpendidikan kategori tinggi (SMA ke atas) sekitar 22 persen.

Dilihat menurut usia 10 tahun keatas persentase penduduk yang belum mengenyam pendidikan masih relatif tinggi dan sekaligus memiliki kesenjangan antara laki dan perempuan. Terlihat pada Gambar 5.1, ada sekitar 8 persen



Gambar 5.1.

Persentase Penduduk Usia 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2013

penduduk laki-laki tidak /belum pernah sekolah sedangkan penduduk perempuan mencapai hampir dua kali lipatnya (15 persen). Jika dilihat menurut kabupaten/kota, penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum sekolah paling tinggi adalah kabupaten Lombok Utara yang

mencapai 16 persen untuk laki-laki dan 26 persen untuk penduduk perempuan.

5.2. Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan Angka partisipasi sekolah (APS). APS dapat merujuk pada perbandingan penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap total penduduk pada kelompok umur tersebut. APS dapat menjadi salah satu indikator yang memberikan gambaran tentang kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama upaya pemerintah melalui program pendidikan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Untuk perhitungan APS, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Kelompok pertama 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Dari Gambar 5.2, memperlihatkan komposisi APS penduduk di

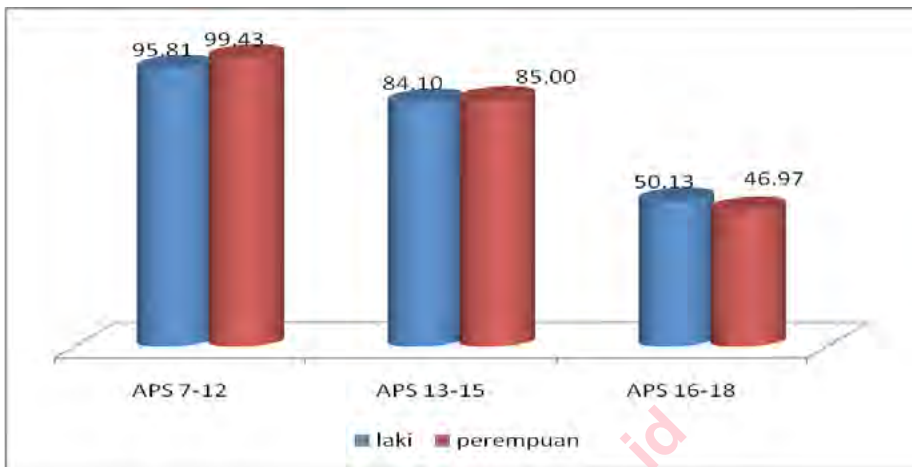
Provinsi NTB pada tahun 2013.

Berdasarkan Gambar 5.2, yang diamati menunjukkan pola hubungan negatif antara umur penduduk dan APS, yaitu semakin tinggi umur penduduk maka APS juga semakin menurun. Pola hubungan ini dapat disebabkan beberapa hal termasuk cara pandang masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan juga pemahaman masyarakat bahwa pendidikan tinggi belum tentu menjamin perbaikan taraf hidup. Selain itu, juga terdapat budaya yang masih diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi toh pada akhirnya akan menjadi istri yang harus mengurus suami.

Apabila memperhatikan APS menurut jenis kelamin, maka APS di masing-masing kelompok umur untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APS laki-laki yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Tetapi sebaliknya pada jenjang pendidikan SMA APS perempuan lebih kecil dibanding laki-laki. Perbedaan APS menurut kelompok umur juga dapat dilihat menurut kabupaten/kota. Pada Gambar 5.2, memperlihatkan, APS

pada kelompok umur 7-12 tahun di semua kabupaten/kota sudah mencapai diatas 98 persen. Hal ini sangat menggembirakan, karena hampir semua penduduk umur sekolah dasar di kabupaten/kota telah menikmati pendidikan dasar. Sedangkan pada kelompok umur 13-15

tahun, APS berkisar antara 84,54 - 96,78 persen. Kabupaten Dompu memiliki APS tertinggi untuk kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 96,78 persen, sedangkan APS terendah terdapat di Kabupaten Lombok Utara sekitar 84,54 persen,



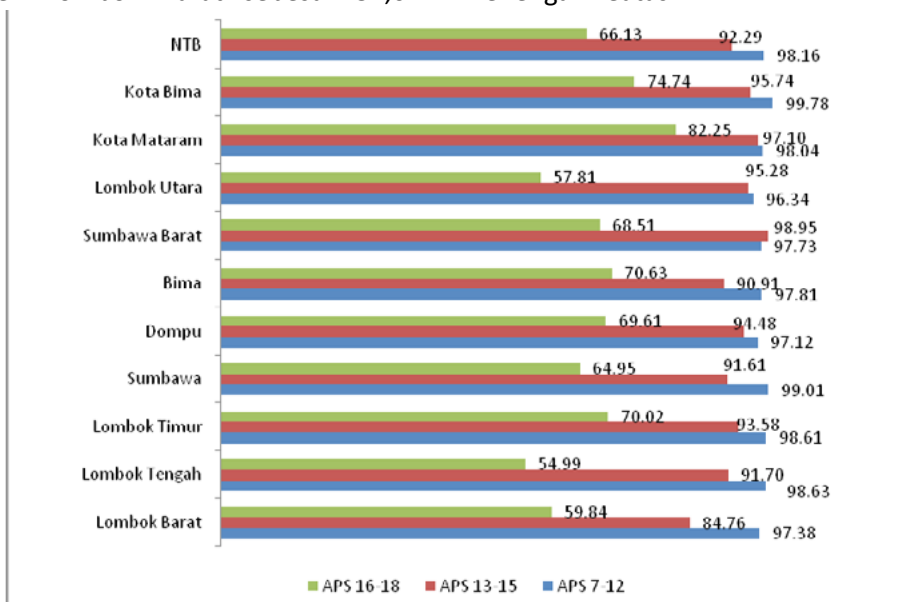
Gambar 5.2.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Untuk kelompok umur 16-18 tahun APS berkisar antara 37,07-79,60 persen. APS ini menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi di antara kabupaten/kota. APS pada kelompok umur 16-18 tertinggi di Kota Mataram yaitu mencapai 79,60 persen, sedangkan APS terendah pada kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Lombok Barat sebesar 37,07

persen. Perbedaan (gap) capaian APS pada kelompok umur 16-18 tahun yang relatif besar ini menyiratkan perlunya pemerataan terhadap aksesibilitas maupun ketersediaan sarana pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota serta upaya sosialisasi kepada penduduk tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan menengah keatas.



Gambar 5.3.

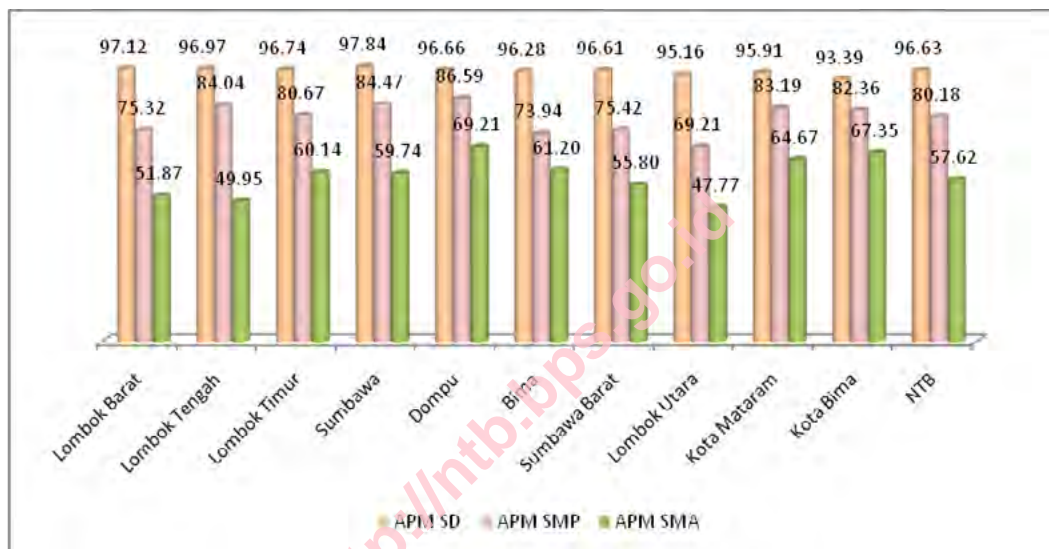
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

5.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui partisipasi penduduk yang bersekolah tepat waktu maupun tepat dari segi umur. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SMP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun, APM SMA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun.

APM SD provinsi NTB telah mencapai

angka 96,63 persen. Artinya, hampir semua penduduk usia 7-12 bersekolah di jenjang yang sesuai tepat pada waktunya. Sedangkan sisanya diduga tidak/belum sekolah, sekolah di jenjang lebih tinggi atau tidak sekolah lagi karena beberapa alasan. Sedangkan APM SMP lebih kecil dari nilai APM SD yaitu mencapai nilai 80,18 persen. Tingginya angka APM SD dan SMP menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.



Gambar 5.4.

APM SD, APM SMP, dan APM SMA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Sementara itu, data faktual menunjukkan bahwa APM SMA baru setengah dari penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah sesuai jenjangnya yaitu berumur 16-18 tahun. Pertanyaannya, bagaimana dengan sebagian penduduk usia 16-18 tahun lainnya?. Apakah mereka termasuk penduduk yang tinggal kelas, masih duduk di SMP atau putus sekolah, atau tidak sekolah lagi. Masih rendahnya APM SMA makin menguatkan perlu pemerintah daerah menyelenggarakan program wajib belajar dua belas tahun di Provinsi NTB.

Berdasarkan komposisi pencapaian APM menurut SD, SMP, dan SMA, maka kabupaten termudah, yakni Lombok Utara memiliki nilai APM lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Bahkan pencapaian APM SMA di Lombok Utara sekitar 47,7 persen. Hal ini memberikan gambaran penduduk usia 16-18

tahun masih banyak yang belum mengenyam pendidikan di SMA. Namun demikian, pencapaian APM SMP kabupaten Lombok Utara hampir di level 70-an persen, dan bahkan pencapaian APM SD capaiannya sudah di level 90-an persen (atau 95,16 persen).

Rasio APM Perempuan dibanding APM laki-laki merupakan salah satu dari indikator MDGs. Rasio ini menggambarkan ketimpangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA) antara perempuan dan laki-laki. Apabila rasio APM lebih besar dari 100 menunjukkan perempuan lebih banyak yang bersekolah dibanding laki-laki. Tabel 5.2 memberikan gambaran tentang rasio APM perempuan dibanding APM laki-laki. Pada tahun 2013 rasio APM SD, SMP lebih dari 100, artinya pada jenjang pendidikan SD dan SMP lebih penduduk perempuan berpartisipasi sekolah

Angka Partisipasi Murni	2010	2013
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	99,84	101,43
SMP/Sederajat	102,55	105,25
SMA/Sederajat	83,64	98,36

Tabel 5.2.

Rasio APM Perempuan Dibanding
APM Laki-laki Jenjang Pendidikan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010 dan 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

dibanding penduduk laki-laki. Tetapi, pada jenjang pendidikan SMA partisipasi sekolah lebih dominan penduduk laki-laki. Capaian rasio APM (SD, SMP, SMA) mengalami pergeseran makna dalam konteks partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA partisipasi penduduk laki-laki cenderung lebih besar dibanding partisipasi penduduk perempuan, namun tiga tahun kemudian pada tahun 2013 partisipasi sekolah penduduk perempuan menunjukkan lebih

tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Artinya, bahwa lambat laun penduduk perempuan sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya kelak.

Namun demikian, pada jenjang pendidikan SMA masih memerlukan waktu bagi perempuan, karena rasionya masih menunjukkan angka dibawah 100. Maknanya, bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA penduduk perempuan masih lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki.

5.4. Melek Huruf

Baca tulis merupakan kemampuan dasar yang dibutuhkan penduduk untuk dapat melangkah lebih maju memperoleh keinginan yang diharapkan. Melalui baca tulis setiap penduduk dapat meningkatkan kapabilitasnya melalui pengetahuan, wawasan serta pendidikan yang diserap. Kemampuan baca tulis penduduk adalah salah satu indikator kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dengan menekan serendah-rendahnya angka buta huruf penduduk, bahkan kalau perlu menjadi nol buta huruf. Melek huruf secara konsep dan definisi diukur dengan menanyakan kepada penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Sedangkan angka melek huruf dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas.

persen. Persentase ini masih tergolong tinggi, mengingat gerakan 3 A utamanya (Absano) telah dilaksanakan sejak tahun 2009 melalui program keaksaraan fungsional.

Komposisi penduduk melek huruf lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3. Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kota Bima mempunyai penduduk melek huruf tertinggi, yaitu sekitar 96,17 persen, diikuti Kota Mataram sekitar 96,38 persen dan kabupaten Sumbawa Barat sekitar 96,04 persen. Sedangkan, tiga kabupaten dengan persentase penduduk melek huruf terendah adalah kabupaten Lombok Tengah (78,94 persen), Kabupaten Lombok Utara (80,05 persen), dan kabupaten Lombok Barat (81,94 persen). Rendahnya persentase penduduk yang melek huruf kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Utara hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) mempertegas hasil Sensus Penduduk (SP'2010) bahwa kedua kabupaten tersebut masih menjadi kantong buta huruf di Provinsi NTB.

Sementara itu, jika kemampuan baca tulis penduduk dirinci menurut jenis kelamin, maka penduduk laki-laki di provinsi NTB

Tabel 5.3 menyajikan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas dapat baca tulis menurut kabupaten kota di provinsi NTB tahun 2013. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk NTB yang masih buta huruf sekitar 13

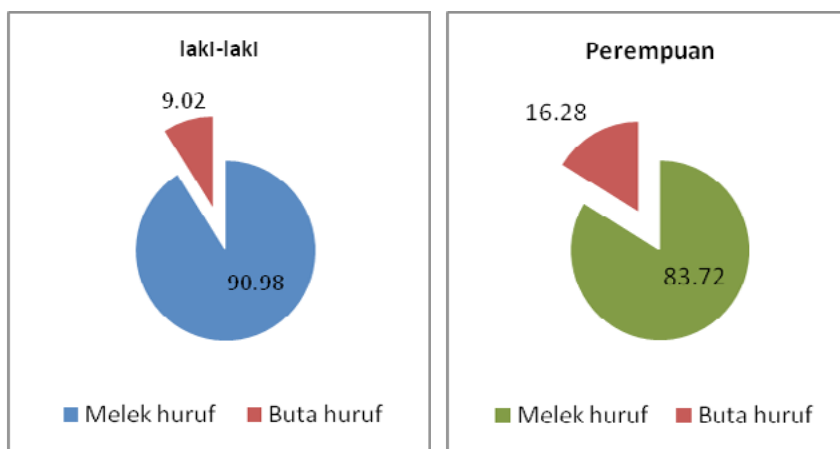
Kabupaten/Kota	Kemampuan Baca Tulis		Total
	Melek Huruf	Buta Huruf	
(1)	(2)	(3)	(9)
Lombok Barat	81,94	18,06	100,00
Lombok Tengah	78,94	21,06	100,00
Lombok Timur	88,34	11,66	100,00
Sumbawa	93,04	6,96	100,00
Dompu	90,50	9,50	100,00
Bima	92,16	7,84	100,00
Sumbawa Barat	94,04	5,96	100,00
Lombok Utara	80,05	19,95	100,00
Kota Mataram	94,38	5,62	100,00
Kota Bima	96,17	3,83	100,00
NTB	87,19	12,81	100,00

Tabel 5.3.

Persentase Penduduk berumur 10 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Baca Tulis di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Gambar 5.5 memperlihatkan penduduk laki-laki yang dapat baca tulis sekitar 90,98 persen berbanding 82,72 persen untuk penduduk perempuan usia

10 tahun keatas. Maksudnya bahwa angka buta huruf penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, bahkan hampir dua kali lipat penduduk laki-laki yang buta huruf.



Gambar 5.5.

Persentase Penduduk berumur 10 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

<http://ntb.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

6

Ketenagakerjaan adalah aspek yang sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan, baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, pekerjaan sangat dibutuhkan seseorang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dari sisi sosial, pekerjaan dibutuhkan seseorang berkenaan dengan kebutuhan psikologis untuk mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki.

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja, maka sepatutnya pemerintah daerah membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Disamping itu juga mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar produktifitas tenaga kerja tetap terjaga dan meningkat seiring dengan makin meningkatnya permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Pengupayaan kualitas sumber daya manusia juga berkenaan dengan mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di wilayah regional Asia maupun Internasional pada era pasar bebas atau globalisasi.

Untuk mengetahui kondisi terkini situasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka beberapa ukuran digunakan, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Lapangan Pekerjaan Utama, Jumlah Jam Kerja dan Upah/Gaji yang biasa diterima,

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di definisikan sebagai proporsi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam usia kerja. Indikator TPAK dapat memberikan gambaran sejauh mana keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi (economic actively).

Disamping itu, TPAK juga memberikan gambaran tentang penawaran (supply) tenaga kerja di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keadaan ketenagakerjaan di provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2011-2013 mengalami tren menurun ditandai dengan penurunan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2011 TPAK mencapai

66,12 persen kemudian menurun menjadi 65,44 persen pada tahun 2013. Maknanya dari setiap 100 orang penduduk tergolong usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2013, 65 orang penduduk diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Perkembangan TPAK menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 6.1. Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa TPAK kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 sekitar 75,90 persen, kemudian diikuti oleh kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Sumbawa Barat masing-masing dengan TPAK 71,62 persen, 66,54 persen, dan 65,62 persen. Adapun kabupaten Lombok Utara mempunyai TPAK paling rendah, yaitu sekitar 57,99 persen. Namun dibandingkan dengan TPAK tahun 2011 ketiga kabupaten seperti Lombok Tengah (66,21 persen), Sumbawa (68,37 persen), Kota Bima (64,84) menunjukkan kenaikan. Sementara itu Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan masing-masing menjadi 69,17 persen dan 66,91 persen. Sementara itu, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yakni kata lain dari besarnya penduduk yang bekerja mengalami

perkembangan menurun. Pada tahun 2011 TTK provinsi NTB sekitar 94,67 persen, menurun menjadi 94,62 persen pada tahun 2013.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa TTK tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 95,41 persen, sedangkan TTK paling rendah di Kota Mataram yaitu sebesar 93,30 persen. Sedangkan pada tahun 2013 kabupaten/kota mengalami perubahan komposisi berdasarkan capaian TTK. TTK tertinggi dicapai Kabupaten Lombok Utara yaitu sebesar 95,98 persen, kemudian berturut-turut diikuti Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Barat masing-masing sebesar 95,89 persen dan 95,84 persen. Adapun posisi terendah pada tahun 2013 adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan TTK sebesar 93,09 persen.

Secara umum pada tahun 2013, TTK kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, kecuali Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima yang sedikit mengalami penurunan. Hal yang cukup menarik adalah fenomena di Kota Bima. Kota Bima mengalami peningkatan TPAK dibanding tahun 2013 namun tidak sejalan dengan peningkatan TTK. Hal ini menggambarkan belum

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	
	2011	2013	2011	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	66,08	61,72	95,11	95,84
Lombok Tengah	66,21	75,90	94,06	94,54
Lombok Timur	65,01	63,89	95,41	93,78
Sumbawa	68,37	71,62	94,83	95,89
Dompu	67,24	59,37	94,13	94,87
Bima	66,67	62,99	94,87	95,10
Sumbawa Barat	69,17	65,62	95,01	93,09
Lombok Utara	66,91	57,99	95,15	95,98
Kota Mataram	64,71	56,15	93,30	94,52
Kota Bima	64,84	66,54	93,64	90,79
NTB	66,12	65,44	94,67	94,62

Tabel 6.1.

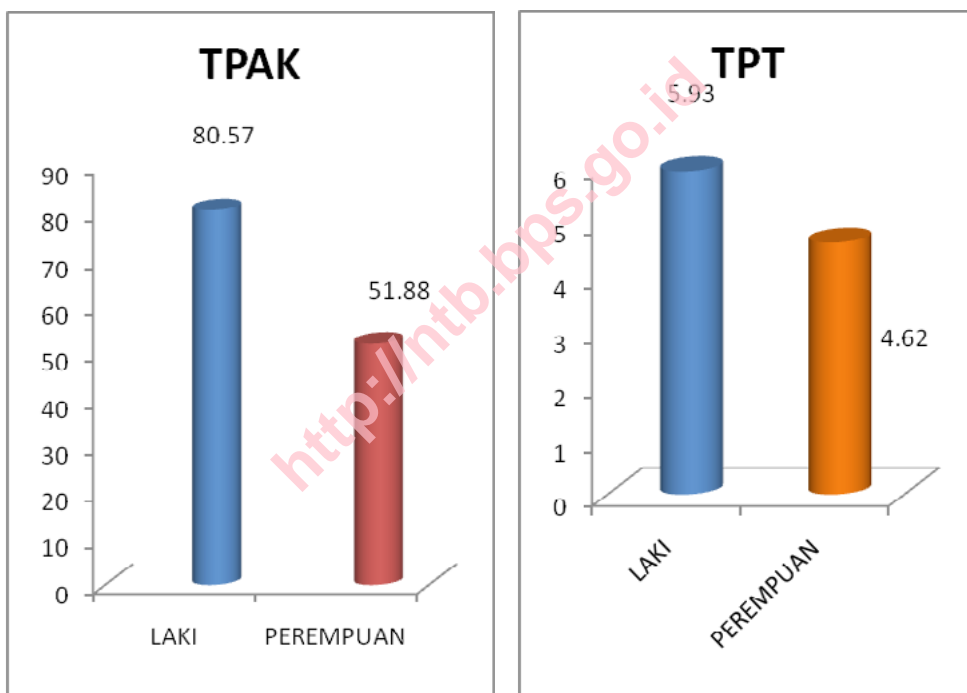
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS

terserapnya tenaga kerja di Kota Bima dalam pasar kerja. Penurunan TKK mengindikasikan peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, penurunan di dua kabupaten tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena penurunan TKK dapat menimbulkan permasalahan pengangguran.

Jika dilihat menurut jenis kelamin masih terdapat kesenjangan antara besaran TPAK perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2013 TPAK laki-laki mencapai sekitar 80 yang berarti dari 100 orang penduduk laki-laki usia kerja (15 tahun ke atas), 80 orang penduduk di antara tergolong sebagai angkatan kerja (bekerja dan pencari kerja). Sedangkan, TPAK perempuan sekitar 52, yang

berarti dari 100 orang penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas), 52 orang penduduk diantaranya sebagai angkatan kerja. Sementara itu, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 6 persen berbanding sekitar 5 persen antara laki-laki dan perempuan, dimana TPT penduduk perempuan menunjukkan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menggambarkan penduduk perempuan relatif lebih sulit mengakses pekerjaan dibanding laki-laki.



Gambar 6.1.
 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

6.2. Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Terminology “lapangan pekerjaan” merujuk pada bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja (apakah sector pertanian, pertambangan, industry,....dst). Sedangkan “status pekerjaan” merujuk pada kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, apakah sebagai buruh/karyawan, berusaha (sendiri atau dibantu). Kedua terminologi ini (bidang kegiatan dan kedudukan dalam pekerjaan) mencerminkan potensi perekonomian wilayah/daerah. Melalui “lapangan pekerjaan” dan “status pekerjaan” dapat diperoleh informasi bahwa perekonomian provinsi NTB masih didominasi oleh peranan sektor pertanian, dimana hampir 50 persen penduduk usia kerja terlibat pada kegiatan ekonomi di sector pertanian. Hanya saja pertanyaannya apakah penduduk yang 50 persen tersebut status pekerjaannya lebih banyak sebagai petani atau buruh?

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah agraris, karena sektor pertanian memiliki peranan besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Selama kurun waktu 2011–2013 sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja yang relative besar dibandingkan sector-sector

lainnya. Namun demikian, dalam periode tersebut secara perlahan jumlah tenaga kerja di sector pertanian sudah mulai bergerak ke sector industry, perdagangan, dan sector-sector lainnya sebagai akibat kemajuan pembangunan. Pada tahun 2011 sebanyak 44,44 persen penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) bekerja di sector pertanian, meningkat menjadi menjadi 45,02 persen pada tahun 2013. Pada sector industri, jumlah pekerja mengalami penurunan dari 8,64 persen pada tahun 2011 menjadi 8,06 persen pada tahun 2013. Penurunan juga terjadi pada sector perdagangan dan sector lainnya dimana masing-masing berkurang sekitar 0,01 persen dan 0,66 persen. Sementara itu, pekerja di sector jasa, mengalami peningkatan dari 14,97 persen pada tahun 2011 menjadi 15,73 persen pada tahun 2013.

Status pekerjaan terdiri dari (a) berusaha sendiri, (b) berusaha dibantu pekerja/buruh tidak tetap/tidak dibayar, (c) berusaha dibantu pekerja/buruh tetap/dibayar, (d) buruh/karyawan, (e) pekerja bebas di pertanian, (f) pekerja bebas di nonpertanian, dan (g) pekerjaan keluarga.

Pada tahun 2013, komposisi pekerja dalam status pekerjaan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun



Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Gambar 6.2.

Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2011 dan 2013

Status Pekerjaan	2011	2013
(1)	(2)	(3)
Berusaha Sendiri	18,30	16,97
Berusaha Dibantu Buruh	26,49	25,16
Buruh/Karyawan	21,87	21,89
Pekerja Bebas	16,12	19,23
Pekerja Keluarga	17,23	16,75
Total	100,00	100,00

Tabel 6.2.

Komposisi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2011 dan 2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

2013 pekerja berstatus berusaha dibantu buruh memiliki persentase terbesar yaitu 25,16 persen, kemudian diikuti oleh buruh/karyawan sebesar 21,89 persen dan pekerja bebas sebesar 19,23 persen. Sedangkan status pekerjaan pekerja

keluarga adalah yang terkecil, yaitu sebesar 16,75 persen. Secara rinci status pekerjaan penduduk dapat dilihat pada Tabel 6.2.

6.3. Jam Kerja

Produktifitas pekerja salah satunya dapat dilihat dari variabel jumlah jam kerja. Besarnya persentase penduduk usia kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, maka dapat dikatakan bahwa produktivitas pekerja masih rendah atau belum maksimal, dan demikian pula sebaliknya, Berdasarkan tabel 6.3, dapat dilihat bahwa tingkat produktifitas para pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2011, Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu, Pada tahun 2011 jumlah pekerja yang menggunakan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu sebanyak 47,55 persen, meningkat menjadi 51,70 persen pada tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Jumlah Jam Kerja			
	Kurang dari 35 jam		35 jam Keatas	
	2011	2013	2011	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	32,74	36,26	67,26	63,74
Lombok Tengah	52,66	60,42	47,34	39,58
Lombok Timur	52,29	54,95	47,71	45,05
Sumbawa	49,00	50,23	51,00	49,77
Dompu	52,10	44,90	47,90	55,10
Bima	59,47	57,26	40,53	42,74
Sumbawa Barat	58,29	46,32	41,71	53,68
Lombok Utara	55,87	58,09	44,13	41,91
Kota Mataram	23,36	37,90	76,64	62,10
Kota Bima	44,48	60,42	55,52	39,58
N T B	47,55	51,70	52,45	48,30

Tabel 6.3.

Komposisi Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Kabupaten/ Kota, Tahun 2011-2013

Sumber : Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

7

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat didekati dengan ukuran kemiskinan. Angka kemiskinan penduduk di suatu daerah, dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk daerah bersangkutan. Disamping ukuran kemiskinan, tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari pola konsumsi penduduk antara makanan dan bukan makanan. Tingginya persentase pengeluaran penduduk untuk makanan terhadap pengeluaran makanan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk rendah. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa persentase pengeluaran untuk makanan akan semakin berkurang dengan semakin meningkatnya pendapatan (Ernest Engel, 1857).

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Berbagai program kemiskinan telah dilaksanakan dari tahun ke tahun bertujuan mengurangi kemiskinan. Program kemiskinan bersifat nasional, kedaerahan, maupun local masyarakat terus diupayakan, sehingga jumlah kemiskinan secara bertahap berkurang meski pengurangannya relatif sedikit. Segala usaha dari program pengentasan kemiskinan pada hakekatnya untuk mewujudkan penduduk yang sejahtera, dan terbebas dari kemiskinan.

Menangani persoalan kemiskinan tidaklah mudah, mengingat kemiskinan bersifat multidimensi. Dan cara penanganan kemiskinan harus bersifat multidimensi pula yang melibatkan banyak pihak, dan lintas sector serta menyeluruh. Mekanisme penanganan seperti ini dipercaya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari target dan sasaran yang diinginkan sehingga secara perlahan dan pasti dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum di Indonesia dan khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.

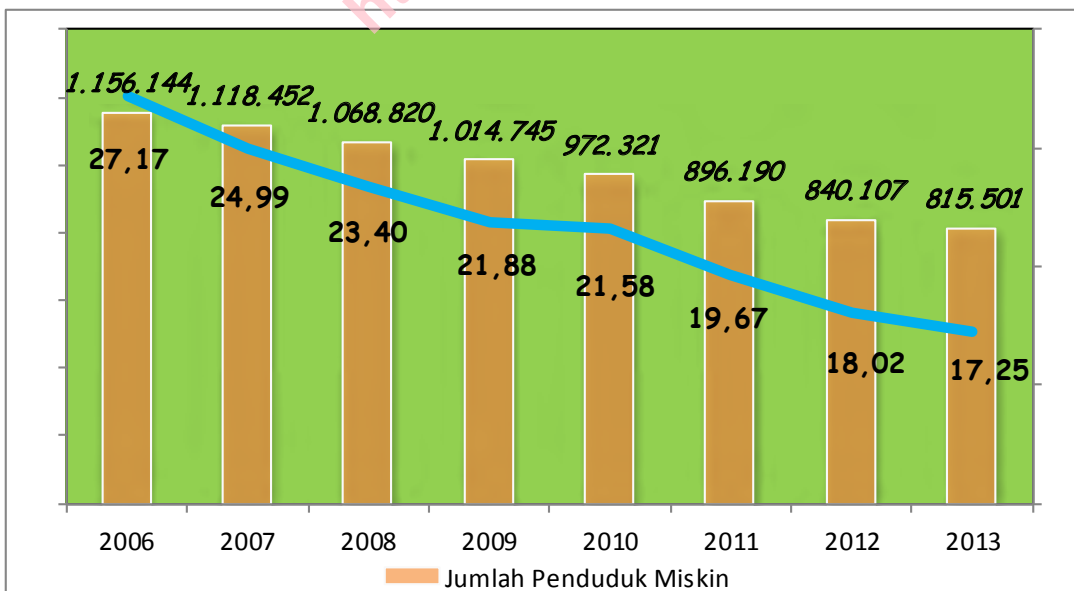
7.1. Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2006–2013 dapat dilihat pada Gambar 7.1. pada gambar tersebut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin mencapai satu juta orang lebih. Relative besarnya jumlah penduduk miskin di tahun 2006 dikarenakan meliputi 27,17 persen dari jumlah penduduk di tahun 2006. Setahun kemudian tahun 2007 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 24,99 persen. selanjutnya persentase penduduk miskin menurun lagi pada tahun 2008 dan 2009 berturut-turut menjadi 23,40 persen dan 21,88 persen. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan menurun kembali menjadi sebanyak 21,58 persen. Lambatnya pengurangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 ini adalah dampak dari adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti oleh naiknya kebutuhan pokok rumahtangga. Stabilitas harga kebutuhan pokok (inflasi) yang terkendali di tahun-tahun berikut serta program pengentasan kemiskinan yang terus dijalankan menjadikan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat

berkurang. Keadaan tahun 2011, persentase penduduk miskin berkurang hampir 2 (dua) persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berkurang lagi menjadi 18,02 persen dan 17,25 persen keadaan tahun 2012 dan 2013.

Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun di Nusa Tenggara Barat ini menunjukkan bukti bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Barat memberikan dampak positif kepada masyarakat menengah bawah. Dampak positif dari penurunan jumlah penduduk miskin adalah pendapatan masyarakat menengah bawah telah meningkat dan ini memberikan dorongan kepada penduduk miskin agar secepatnya keluar dari perangkap kemiskinan.

Tabel 7.1 memperlihatkan perkembangan penduduk miskin menurut kabupaten/kota dalam periode waktu tahun 2011–2013. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota relative bervariasi. Besaran kemiskinan yang berbeda antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya disparitas tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota. Disparitas ini patut ditelusuri kenapa bisa terjadi?. Fakta statistic menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota



Gambar 7.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin (P_0)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lombok Barat	119.639	112.188	110.986	21,59	19,70	17,91
Lombok Tengah	157.983	148.153	145.151	19,92	18,14	16,71
Lombok Timur	243.058	227.859	219.559	23,82	21,71	20,07
Sumbawa	83.416	78.208	73.786	21,75	19,82	18,25
Dompu	40.279	37.830	36.397	19,90	18,17	16,57
Bima	78.531	73.634	73.832	19,41	17,66	16,22
Sumbawa Barat	23.135	21.724	21.710	21,82	19,88	17,6
Lombok Utara	79.545	74.155	72.157	43,14	39,27	35,97
Kota Mataram	53.736	50.478	46.674	14,44	13,18	11,87
Kota Bima	16.868	15.878	15.249	12,80	11,69	10,54
N T B	896.190,0	840.107	815.501	19,67	18,02	17,25

Tabel 7.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013

memiliki perbedaan potensi berkenaan dengan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) seperti ; Pulau Lombok potensi lebih subur dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. dapat dilihat pada Tabel 7.1. Pada table tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Utara sekitar 43,14 persen. Besaran persentase penduduk miskin di kabupaten Lombok Utara merupakan yang tertinggi se kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Disusul Kabupaten Lombok Timur sekitar 23,82 persen dan Kabupaten Sumbawa sekitar 19,92 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin paling rendah adalah Kota Bima sekitar 12,80 persen dan Kota Mataram sekitar 14,44 persen. Apabila dilihat berdasarkan pulau, maka jumlah penduduk miskin terbanyak di Nusa Tenggara Barat berada di Pulau Lombok. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk di NTB, dimana sekitar 2/3 penduduk berada di Pulau Lombok, seperti : Lombok Timur (224,692 jiwa), diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah (146,031 jiwa), dan Kabupaten Lombok Barat (110,542 jiwa).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar

mengetahui berapa jumlah atau persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P_1). Kebijakan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin saja, tetapi juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P_1) atau meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis/batas kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks kedalaman maka semakin lebar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk,

Gambar 7.2 memperlihatkan perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Terlihat terjadi kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat. Ini dapat dilihat dari besarnya indeks kedalaman kemiskinan ($P_1 > 0$). Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2011 –

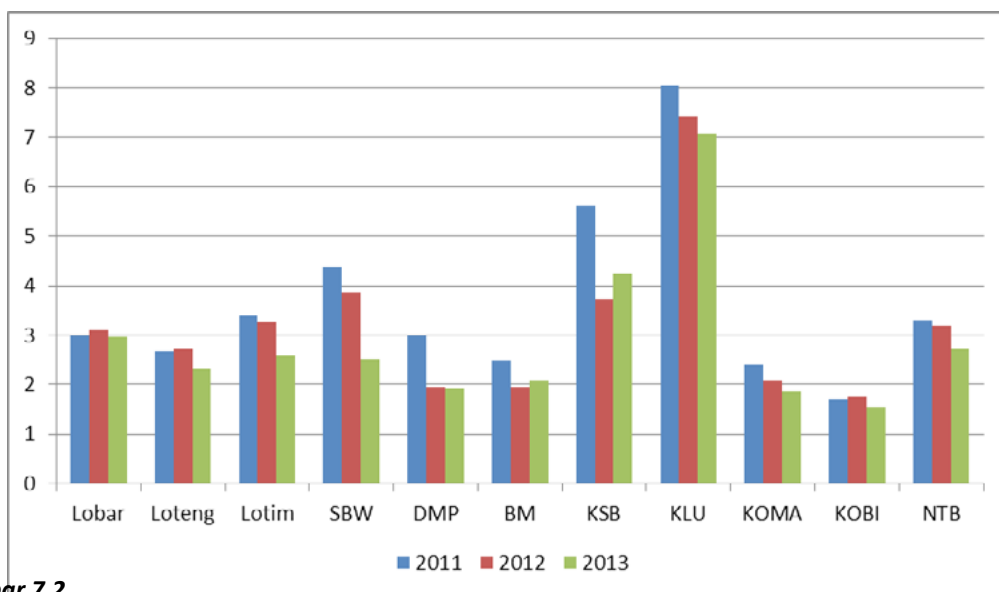
2013 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat konsisten menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) NTB keadaan tahun 2011 mencapai sebesar 3,30 dan terus menurun pada keadaan tahun 2012 dan 2013 sebesar 3,20 dan 2,72. Menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Atau pengeluaran penduduk miskin bergerak mendekati garis kemiskinan.

Gambar 7.2 juga memperlihatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) masing-masing kabupaten/kota. Pada gambar tersebut terlihat bahwa P1 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,56-7,07. Pada gambar tersebut juga terlihat kesenjangan tertinggi pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan adalah terjadi di Kabupaten Lombok Utara sekitar 7,07 pada tahun 2013, sedangkan yang terendah adalah Kota Bima sekitar 1,56. Sementara itu, kabupaten Sumbawa Barat sebesar 4,25 dan kabupaten Lombok Barat sekitar 2,96. Angka yang terdapat pada P1 memberikan penjelasan tentang penduduk miskin yang mempunyai jarak (gap) pengeluaran terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, selama kurun waktu tahun 2011–2012 memperlihatkan bahwa P1 mengalami penurunan di beberapa kabupaten/kota, antara Kabupaten Lombok

Tengah, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kota Mataram. Ini berarti penduduk miskin di lima kabupaten/kota tersebut pengeluarannya bergerak mendekati garis kemiskinan yang berarti adanya peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, yang sangat perlu dilihat dan dianalisis adalah indeks keparahan kemiskinan. Angka Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang.

Perkembangan P2 di Nusa Tenggara Barat periode tahun 2011–2013 dapat dilihat pada Gambar 7.3. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa P2 pada tahun 2011 sekitar 0,86 mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, berturut-turut menjadi 0,83 dan 0,66. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin menyempit atau berkurang diantara penduduk miskin. Dari Gambar 7.3, kabupaten/kota yang mempunyai indeks keparahan kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa Barat.



Gambar 7.2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2013



Gambar 7.3.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2013

7.2. Pola Konsumsi

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk adalah pola pengeluaran/konsumsi, yaitu porsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa persentase pengeluaran untuk makanan akan semakin berkurang dengan semakin meningkatnya pendapatan (Ernest Engel, 1857). Semakin tinggi pendapatan porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan

Persentile Pengeluaran	Porsi Makanan (%)	Porsi Bukan Makanan (%)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
10	66,60	33,40	100,00
20	70,19	29,81	100,00
30	70,81	29,19	100,00
40	66,43	33,57	100,00
50	64,99	35,01	100,00
60	62,87	37,13	100,00
70	61,70	38,30	100,00
80	60,36	39,64	100,00
90	57,76	42,24	100,00
100	43,13	56,87	100,00

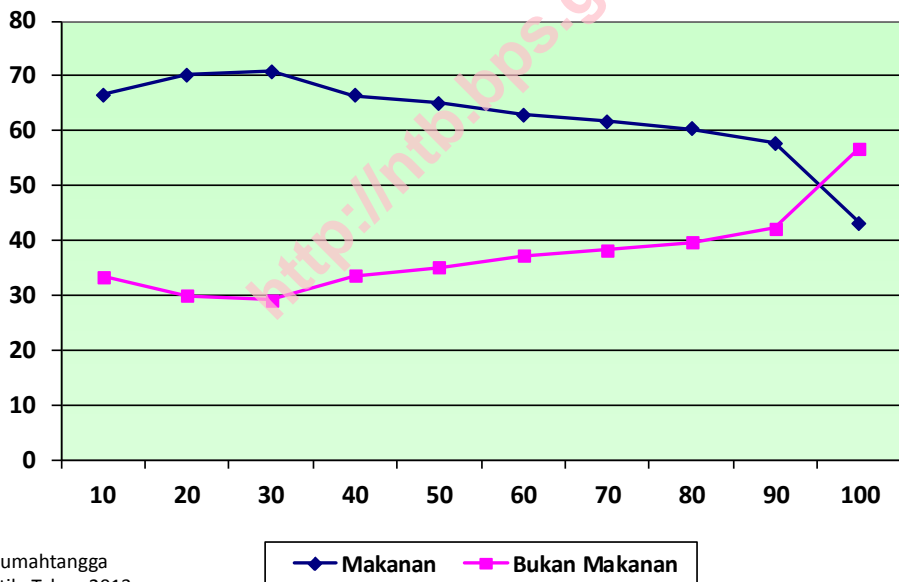
Tabel 7.2.

Pola Konsumsi Rumah tangga menurut Persentile di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Hasil Susenas tahun 2013 akan membuktikan teori ekonomi di atas. Untuk itu perlu kita melihat pola konsumsi rumahtangga menurut persentile pengeluaran dan pola konsumsi rumahtangga. Tabel 7.2 memperlihatkan pola konsumsi rumahtangga menurut persentile pengeluaran yang juga divisualisasikan pada

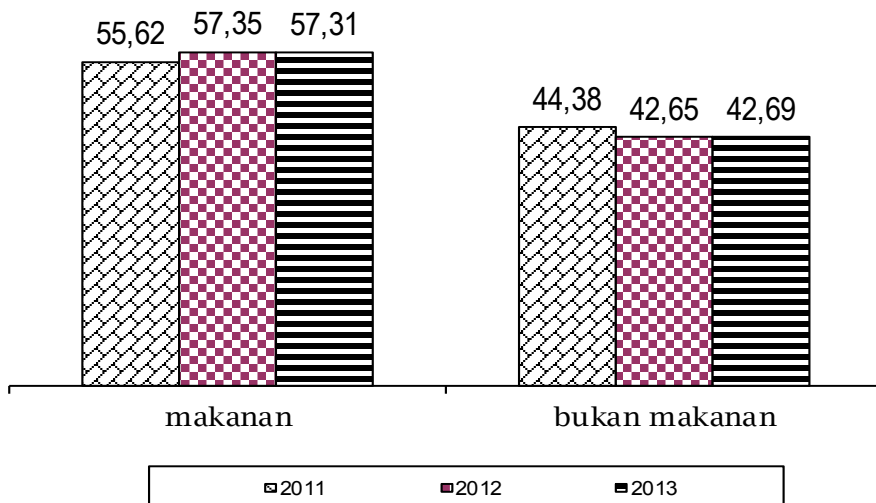
Gambar 7.4. Tabel 7.2 memperlihatkan adanya kecenderungan semakin tinggi persentile, maka rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pengeluaran makanan semakin turun dan pengeluaran bukan makanan semakin naik. Pada posisi persentile 10, hampir 2/3 pengeluaran rumah tangga digunakan untuk kebutuhan makan dan 1/3-nya untuk kebutuhan bukan makanan. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mempunyai penghasilan terbatas, dalam kesehariannya yang dipikirkan hanya makan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, seperti : papan, sandang, kesehatan dan pendidikan mengalami kesulitan atau tidak terpikirkan. Sementara itu, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, semakin menurun pengeluaran makanan dan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan bukan makanan semakin besar seperti yang



Gambar 7.4.
Pola Konsumsi Rumahtangga Menurut Persentile Tahun 2013

terlihat pada Gambar 7.4. Perkembangan pola konsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Gambar 7.5. Dalam kurun waktu tahun 2011 - 2013, terjadi kecenderungan kenaikan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kebutuhan makanan dan cenderung terjadi penurunan persentase pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan. Dari angka proporsi konsumsi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, apabila masyarakat mempunyai proporsi pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Kalau diperhatikan dalam kurun waktu 2011-2013, proporsi pengeluaran bukan makanan cenderung mengalami penurunan. Ini berarti dapat menjadi early warning bahwa adanya sedikit penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2011-2013.



Gambar 7.5.

Perkembangan Pola Konsumsi Rumah tangga di Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2013

Tabel 7.3 memperlihatkan besarnya pengeluaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2013, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling tinggi terjadi di Kota Mataram, yaitu sebesar Rp. 963.610,-, disusul Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 878.595,-. Sedangkan, Kabupaten Dompu mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling rendah, yaitu hanya sebesar 421.666,-.

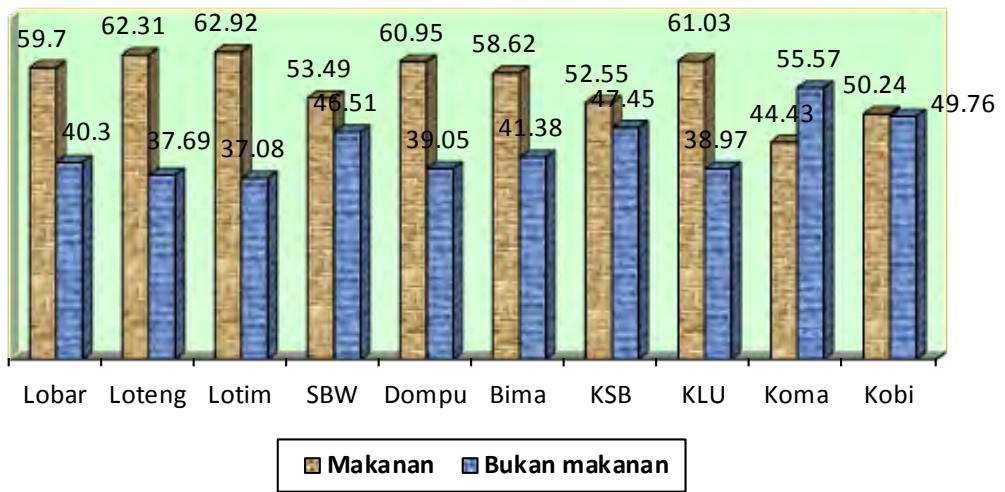
Apabila dilihat dari pola konsumsi pengeluaran

rumah tangga, terlihat hanya Kota Mataram yang mempunyai porsi pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan porsi pengeluaran makanan. Porsi pengeluaran rumah tangga bukan makanan di Kota Mataram sebanyak 44,43 persen dan makanan sebanyak 55,57 persen. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya porsi pengeluaran bukan makanan masih di bawah 50 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Mataram lebih sejahtera dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya.

Kabupaten/Kota	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	280.545	189.372	469.917
Lombok Tengah	320.066	193.590	513.655
Lombok Timur	311.796	183.746	495.542
Sumbawa	341.366	296.878	638.244
Dompu	256.998	164.668	421.666
Bima	258.796	182.689	441.485
Sumbawa Barat	461.688	416.907	878.595
Lombok Utara	252.099	160.950	413.049
Kota Mataram	428.091	535.520	963.610
Kota Bima	356.230	352.843	709.073
Nusa Tenggara Barat	317.076	236.141	553.217

Tabel 7.3.

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013



Gambar 7.6.
 Pola Konsumsi Rumahtangga
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun
 2013

<http://ntb.bps.go.id>

PERUMAHAN

8

Rumah tempat tinggal mempunyai fungsi utama sebagai tempat berlindung penghuninya dari terik panas matahari dan terpaan angin atau hujan, serta sebagai tempat berkumpul dengan sanak saudara. Kedua fungsi utama tersebut menempatkan rumah tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi masyarakat, di samping kebutuhan pangan dan sandang. Pentingnya fungsi dan peran rumah tersebut, mengakibatkan masyarakat senantiasa berusaha menciptakan tempat tinggal yang memiliki persyaratan untuk dihuni secara layak baik dilihat dari segi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan lingkungan.

Keberadaan rumah tempat tinggal akan sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, menempati rumah tempat tinggal yang layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, maupun keamanan merupakan suatu impian yang sulit diwujudkan. Terbatasnya lahan untuk pemukiman dan tingginya permintaan rumah tempat tinggal yang layak huni menyebabkan harga rumah menjadi sangat tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh karena itu mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan akan pangan dan sandang. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, fungsi rumah sudah mulai bergeser bukan hanya sebagai tempat berlindung dan berkumpul. Keberadaan rumah menjadi bagian dari gaya hidup dan penentu status sosial bagi pemiliknya di masyarakat.

8.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

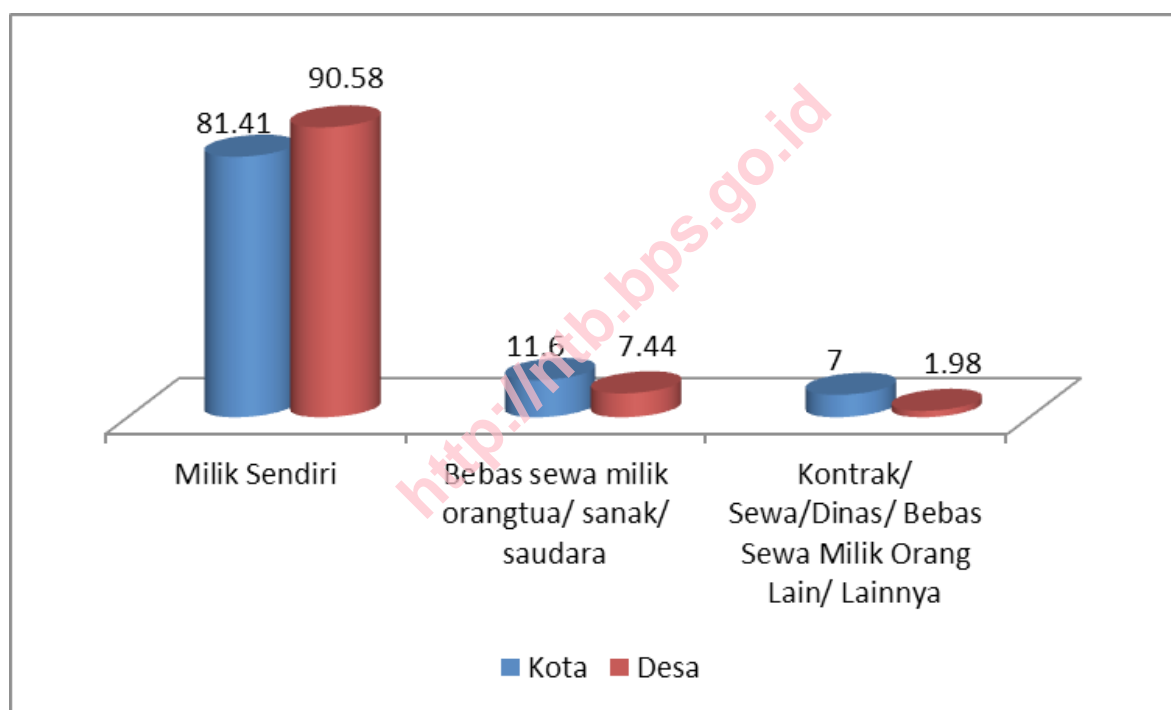
Rumah tempat tinggal yang di huni oleh masyarakat dapat merupakan milik sendiri, mengontrak, menyewa, ataupun rumah dinas. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menumpang di rumah sanak saudara. Bagi masyarakat yang belum menempati rumah milik sendiri, dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor ekonomi pada umumnya merupakan

faktor utama, karena harga rumah yang cukup tinggi sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Di samping faktor utama tersebut, sering berpindah-pindah tugas dapat menjadi faktor kenapa masyarakat tidak menempati rumah milik sendiri. Masyarakat lebih memilih untuk mengontrak, menyewa, ataupun menempati

rumah dinas. Faktor lain kenapa seseorang tidak memiliki rumah sendiri, dapat dikarenakan belum memperoleh rumah yang layak huni dan memiliki posisi yang strategis dengan berbagai fasilitas sosial yang lengkap seperti rumah sakit, sekolah, supermarket, dan fasilitas sosial lainnya. Semakin strategis dan lengkapnya fasilitas sosial suatu daerah, maka akan semakin banyak daerah perumahan di daerah tersebut. Dan sebaliknya, daerah yang tidak memiliki fasilitas sosial yang lengkap akan semakin jarang daerah perumahannya. Oleh karena itu,

pemerintah harus senantiasa memperhatikan persebaran posisi perumahan di suatu wilayah. Sehingga persebaran penduduk dapat lebih merata, yang akan diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas 2013, Gambar 8.1 memperlihatkan kondisi status penguasaan tempat tinggal antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Di pedesaan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu di pedesaan sebanyak 90,58 persen dan perkotaan



Gambar 8.1.
 Persentase Rumahtangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Tipe Daerah Tahun 2013

sebanyak 81,41 persen. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan dikarenakan harga lahan tempat tinggal di pedesaan masih dapat dijangkau, pemberian lahan tempat tinggal oleh orang tua (warisan), upah buruh bangunan relatif lebih dan desain tempat tinggal tidak diutamakan. Sementara itu, status penguasaan tempat tinggal bebas sewa milik famili dan kontrak/bebas sewa milik oranglain/lainnya,

daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah pedesaan. Daerah perkotaan tempat tinggal berstatus sewa milik famili sebanyak 11,60 persen dan daerah pedesaan hanya sebanyak 7,44 persen. Sedangkan tempat tinggal berstatus kontrak/bebas sewa milik orang lain, perkotaan sebanyak 7,00 persen dan pedesaan sebanyak 1,98 persen.

8.2. Kualitas Tempat Tinggal

Kualitas rumah tempat tinggal akan mencerminkan kelayakan rumah tempat tinggal untuk di huni baik dari segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan bagi penghuninya. Secara umum kualitas rumah tempat tinggal sangat ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan baik itu bahan untuk lantai, atap, ataupun dinding. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan seseorang, maka bahan bangunan yang digunakan untuk membangun suatu rumah tempat tinggal akan lebih berkualitas.

Pada Tabel 8.1 memperlihatkan kualitas tempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013. Salah satu kriteria rumah sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah tempat tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Diperlihat bahwa di perkotaan sekitar 60,24 persen rumahtangga yang menempati tempat tinggal dengan luas lantai ≥ 10 m² per orang, sedangkan sisanya masih memiliki rumah dengan kondisi luas lantai yang tidak memenuhi kualifikasi rumah sehat. Sedangkan di pedesaansekitar 58,43 persen rumahtangga tinggal di rumah yang luas lantainya < 10 m² per orang. Kondisi ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kualitas tempat tinggal yang lain adalah jenis lantai. Bangunan tempat tinggal dengan lantai marmar/keramik/ubin/semen mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan tempat tinggal berlantaikan tanah. Dari segi kesehatan dan kebersihan lingkungan, tempat tinggal berlantaikan tanah mempunyai kualitas yang rendah. Maka jenis lantai menjadi salah satu indikator derajat kesehatan tempat tinggal. Dari hasil Susenas 2013 menginformasikan bahwa tempat tinggal berlantaikan bukan tanah di daerah perkotaan mencapai sebanyak 93,00 persen dan di pedesaan juga sekitar sebanyak 93,23 persen. Ini berarti tinggal sekitar 7 (tujuh) persen rumahtangga baik perkotaan maupun pedesaan tempat tinggalnya berlantaikan tanah. Rumahtangga ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas tempat tinggal lainnya adalah jenis atap. Tempat tinggal beratapkan beton dan genteng lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan tempat tinggal beratapkan seng/asbes/ijuk/lainnya. Seperti yang terlihat pada Tabel 8.1, bahwa tempat tinggal daerah perkotaan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan pedesaan, apabila dilihat dari jenis atap. Di mana tempat tinggal yang beratap beton/genteng di perkotaan mencapai 78,42 persen berbanding 71,91 persen untuk tempat tinggal di pedesaan. Kemudian indikator lain yang tak kalah pentingnya untuk menentukan kualitas tempat tinggal adalah jenis dinding. Jenis dinding tempat tinggal merupakan salah satu bagian konstruksi bangunan yang sangat penting. Kekuatan bangunan tempat tinggal yang berjenis dinding tembok lebih kuat dibandingkan jenis dinding dari kayu/bambu/lainnya. Dari tabel 8.1 menunjukkan bahwa daerah perkotaan lebih banyak tempat tinggal berjenis dinding tembok dibandingkan pedesaan. Tempat tinggal berdinding tembok diperkotaan sebanyak 86,85 persen, sedangkan di pedesaan hanya sebanyak 66,89 persen. Ini artinya sekitar 1/3 rumahtangga di pedesaan masih berdindingkan kayu/bambu/lainnya.

Pada Tahun 2013, rumah tempat tinggal di perkotaan dengan lantai bukan tanah sebesar 93,00 persen dan di daerah pedesaan sebesar 93,23 persen. Penggunaan jenis lantai bukan tanah tentu akan lebih menjamin kesehatan dan kenyamanan dari penghuninya. Lantai tanah relatif tidak baik dari segi kesehatan, karena selain kotor dan berdebu juga dapat menjadi tempat subur untuk tumbuh dan berkembangnya penyakit.

Jenis atap yang dipakai untuk rumah tempat tinggal dapat berupa genteng, beton, seng, asbes, dan daun-daunan. Di antara berbagai jenis atap tersebut, penggunaan atap dari genteng dan beton akan membuat penghuninya lebih nyaman. Karena tekstur atap dari genteng dan beton yang lebih kuat dan kokoh untuk melindungi penghuninya dari teriknya panas

matahari serta terpaan angin ataupun hujan. Pada Tahun 2013, rumah tempat tinggal di perkotaan yang beratap genteng atau beton sebesar 78,42 persen dan di daerah pedesaan sebesar 71,91 persen.

Salah satu kriteria rumah layak huni lainnya adalah dinding tembok. Dinding pada dasarnya mempunyai fungsi penting sebagai pembatas

rumah tempat tinggal dengan lingkungan alam dan sosial sekitarnya. Dengan menggunakan dinding tembok, unsur kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penghuni akan lebih terjamin dibandingkan penggunaan kayu dan bambu sebagai tembok.

Indikator Kualitas Perumahan	Tipe Daerah	
	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
Luas Lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ per orang	60,24	58,43
Lantai Bukan Tanah	93,00	93,23
Atap Genteng dan Beton	78,42	71,91
Dinding Tembok	86,85	66,89

Tabel 8.1.

Persentase Rumah Tinggal Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

8.3. Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas pokok yang harus dimiliki oleh sebuah rumah tempat tinggal antara lain ketersediaan listrik, air bersih, dan jamban. Kelengkapan dan kualitas fasilitas pokok tersebut akan sangat menentukan kelayakan huni sebuah rumah dari segi kesehatan dan kenyamanan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka fasilitas pokok yang terdapat dalam suatu rumah tempat tinggal akan lebih lengkap dan berkualitas.

Berdasarkan Tabel 8.2. memperlihatkan tiga indikator fasilitas perumahan yaitu penerangan listrik, dan jamban keluarga serta bahan bakar memasak. Rumahtangga di perkotaan hampir semua sudah memanfaatkan listrik sebagai penerangan tempat tinggalnya, yaitu mencapai 99,17 persen. Sementara itu, rumahtangga di pedesaan yang memanfaatkan listrik sebagai sumber penerangan sebanyak 93,41 persen. Ini berarti di pedesaan masih sekitar 6,59 persen yang belum mempunyai akses listrik sebagai sumber penerangan. Rumahtangga

ini dimungkinkan belum mengakses sumber penerangan listrik dikarenakan di daerahnya belum ada jaringan fasilitas listrik, terutama daerah terpencil atau kemampuan ekonomi masyarakat yang belum dapat menjangkau.

Fasilitas pokok suatu tempat tinggal yang sangat penting lainnya adalah fasilitas buang air besar (BAB). Derajat kesehatan masyarakat juga ditentukan akan keberadaan fasilitas BAB di tempat tinggal. Selain itu BAB juga mencerminkan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Rumahtangga yang mempunyai fasilitas jamban sendiri berperilaku lebih sehat dibandingkan dengan rumahtangga yang tidak mempunyai jamban sendiri. Rumahtangga yang tidak mempunyai jamban sendiri biasanya sembarangan BABnya, seperti di kebun, parit, sungai dan sejenisnya. Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa masih banyak rumahtangga di Nusa Tenggara Barat belum mempunyai jamban. Di daerah perkotaan rumahtangga yang

Indikator Kualitas Perumahan	Tipe Daerah	
	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
Penerangan Listrik	99,17	93,41
Jamban Keluarga	54,58	39,00
Bahan Bakar Memasak Listrik/Gas/LPG	41,90	21,84

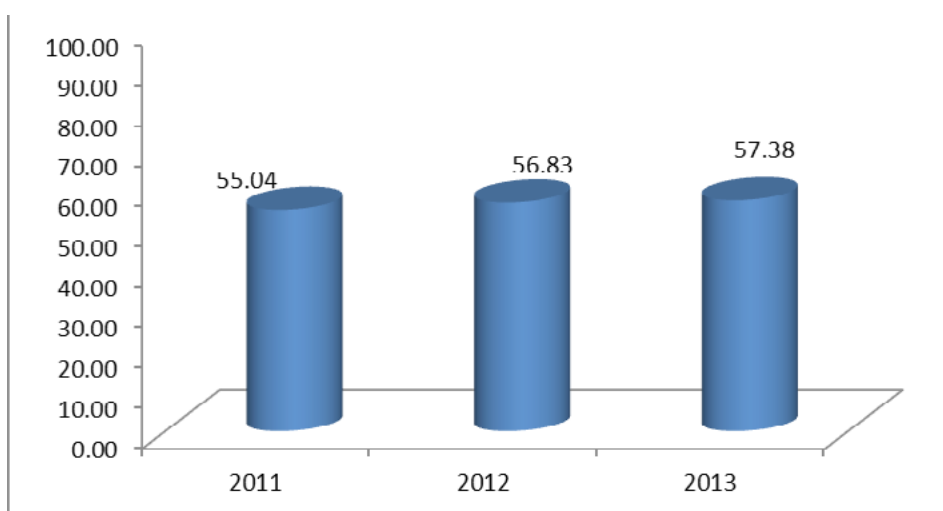
Tabel 8.2.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

mempunyai jamban sendiri hanya sebanyak 54,58 persen dan sebanyak 45,32 persen belum mempunyai jamban. Sementara itu, lebih parah rumahtangga di pedesaan. Rumahtangga yang tidak mempunyai jamban sendiri mencapai 61,00 persen. Melihat kondisi ini, perhatian pemerintah daerah terhadap perilaku hidup sehat harus terus dilakukan di masyarakat. Program pembangunan untuk mendorong masyarakat hidup sehat harus dilanjutkan. Bahan bakar memasak rumahtangga juga sangat penting keberadaannya. Bahan bakar memasak yang paling baik dimanfaatkan adalah bersumber dari listrik/gas/LPG. Sumber memasak ini sangat sedikit menimbulkan polusi di lingkungan. Hasil Susenas 2013 menunjukkan bahwa rumahtangga daerah perkotaan yang sudah menggunakan listrik/gas/LPG sebagai

bahan bakar memasak sebanyak 41,90 persen dan di pedesaan hanya sebanyak 21,84 persen. Sisanya menggunakan bahan bakar memasak dari kayu bakar/minyak tanah/lainnya.

Kebutuhan pokok rumahtangga lainnya adalah air bersih. Air bersih sangat diperlukan untuk sumber mandi, cuci, dan minum. Gambar 8.2 menunjukkan hanya separuh dari rumahtangga di NTB yang sudah mengakses air bersih, walaupun angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013 rumahtangga yang mengakses air bersih sebesar 57,38 persen dan mengalami peningkatan kurang dari satu persen per tahunnya. Hal ini tentunya merupakan PR bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.



Gambar 8.2.

Persentase Rumahtangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2013

Daftar Pustaka

Isbandi Rukminto Adi (2007): *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nasikun Dr. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta

Spicker, Paul (1988) *Principles of social welfare*. London:Routledge

<http://ntb.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram 83125
Telp. 0370 621385 fax. 0370 623801
email. bps 5200@bps.go.id